

**PENGARUH OPINI AUDIT, TEMUAN AUDIT, TINDAK LANJUT  
REKOMENDASI, KOMITMEN KEPALA DAERAH, KEKAYAAN  
PEMERINTAH DAERAH, UKURAN PEMERINTAH DAERAH  
TERHADAP PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN  
SITUS WEB PEMERINTAH DAERAH  
(Studi pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Oleh:**

**Attarik Yusuf Aryantama  
NIM. 185221254**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN MAS SAID SURAKARTA  
2023**

**PENGARUH OPINI AUDIT, TEMUAN AUDIT, TINDAK LANJUT  
REKOMENDASI, KOMITMEN KEPALA DAERAH, KEKAYAAN  
PEMERINTAH DAERAH, UKURAN PEMERINTAH DAERAH  
TERHADAP PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN  
SITUS WEB PEMERINTAH DAERAH  
(Studi pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh:

**Attarik Yusuf Aryantama**  
**NIM. 18.52.21.254**

Surakarta, 27 April 2023

Disetujui dan disahkan oleh:  
Dosen Pembimbing Skripsi



**Anim Rahmayati, S.E.I., M.Si.**  
**NIP. 19841008 201403 2 005**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ATTARIK YUSUF ARDYANTAMA  
NIM : 185221254  
JURUSAN : AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “ Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, Tindak Lanjut Rekomendasi Audit, Komitmen Kepala daerah, Kekayaan Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Situs Web Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021) ”.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Surakarta, 13 April 2023

  
METERAI  
TEMPEL  
IC42AKX295529917 Attarik Yusuf A

## SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ATTARIK YUSUF ARDYANTAMA  
NIM : 185221254  
JURUSAN/PRODI : AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, Tindak Lanjut Rekomendasi Audit, Komitmen Kepala daerah, Kekayaan Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Situs Web Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021)"

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya benar-benar melakukan penelitian dan pengambilan data di kantor Badan Pemeriksa Keuangan di kota Semarang. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai dan data yang sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 13 April 2023  
  
Attarik Yusuf Ardyantama

Anim Rahmayati, S.E.I., M.Si.  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Uin Raden Mas Said Surakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Sdr : Attarik Yusuf A

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta  
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Attarik Yusuf A NIM: 185221254 yang berjudul :


PENGARUH OPINI AUDIT, TEMUAN AUDIT, TINDAK LANJUT REKOMENDASI, KOMITMEN KEPALA DAERAH, KEKAYAAN PEMERINTAH DAERAH, UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP LAPORAN PENGUNGKAPAN DAERAH TERHADAP PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN SITUS WEB PEMERINTAH DAERAH ( Studi Pada Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021 )

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) dalam bidang ilmu Akuntansi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat. Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 13 April 2023  
Dosen Pembimbing Skripsi

  
Anim Rahmayati, S.E.I., M.Si.  
NIP. 19841008 201403 2 005

**PENGESAHAN**

**PENGARUH OPINI AUDIT, TEMUAN AUDIT, TINDAK LANJUT REKOMENDASI,  
KOMITMEN KEPALA DAERAH, KEKAYAAN PEMERINTAH DAERAH,  
UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGUNGKAPAN  
LAPORAN KEUANGAN SITUS WEB PEMERINTAH DAERAH  
(Studi pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021)**

Oleh :

**ATTARIK YUSUF ARYANTAMA**  
**NIM. 18.52.2.1.254**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah  
pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 M / 12 Syawal 1444 H dan dinyatakan  
telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

Dewan Penguji :

Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)  
Ade Setiawan, M.AK., CRA., CRP., CIAP.  
NIP. 19871221 201701 1 165



Penguji II  
Aryani Intan Endah Rahmawati, M.Sc.  
NIP. 19930521 201903 2 012



Penguji III  
Frank Aligarh, M.Sc.  
NIP. 19910513 201701 1 124



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta



  
Dr. M. Rahmawan Arifin, M.Si  
NIP. 19720304 200112 1 004

**MOTTO**



*Hidup seperti Larry.*

*(Spongebob)*

## **PERSEMBAHAN**

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas segala kenikmatan, keberkahan, kemudahan, serta limpahan karunia-Nya selama penulis berjuang untuk mendapatkan apa yang dicita-citakan. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta.
2. Segenap *civitas* akademika Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Keluarga besar Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam dan Almamater Program Studi Akuntansi Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.



## **KATA PENGANTAR**

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Direktur Keluarga, Direktur Independen, Komite Remunerasi Dan Kepemilikan Eksekutif Terhadap Remunerasi Eksekutif Pada Perusahaan Keluarga di Indonesia”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir dalam menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, tenaga, waktu dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd., Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
2. Dr. M. Rahmawan Arifin, S.E., M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Khairul Imam , M.Si selaku Ketua Jurusan Manajemen dan Akuntansi Syariah.
4. Fitri Laela Wijayati, S.E., M.Si.Ak., Ketua Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

5. Anim Rahmayanti, S.E.I., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Kedua orang tuaku, terimakasih atas doa-doa dan pengorbanan, serta dukungan yang tidak pernah habis untukku. Semoga penulis dapat terus selalu membanggakan.
8. Segenap keluarga serta saudara-saudaraku, terimakasih atas semangat serta doa-doa yang telah diberikan.
9. Teman-teman angkatan 2018 Akuntansi Syariah F yang telah menjadi teman berjuang selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi.
11. Terkait semuanya penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih serta mendoakan semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah SWT, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Surakarta, 27 April 2023



Penulis

## **ABSTRACT**

*This study aims to examine the effect of audit opinion, audit finding, follow-up recommendation, regent commitment, regent wealth, government size, on the disclosure of financial reports on local government website.*

*The sampling technique in this study is purposive sampling and it is obtained by 35 districts of Central Java in 2018-2021 that are used as samples of this study. The data analysis method used is logistic regression. The analysis technique used in this study is EViews 12 software program.*

*The results of this study indicate that audit opinion, audit finding variables have a negative effect on disclosure of financial reports on local government website. Meanwhile regent commitment, and government size variables have a positive effect, and follow-up recommendation, and regent wealth variables have no effect on disclosure of financial reports on local government website.*

*Keywords: Disclosure Of Financial Reports, Audit Opinion, Audit Finding, Follow-Up Recommendation, Regent Commitment, Regent Wealth, Government Size.*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh opini audit, temuan audit, tindak lanjut rekomendasi, komitmen kepala daerah, kekayaan pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah terhadap pengungkapan laporan keuangan situs web pemerintah daerah.

Teknik Pengambilan Sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling dan diperoleh sebanyak 35 Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018-2021 yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan yaitu regresi logistik. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan bantuan program software EViews 12.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel opini audit, dan temuan audit mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan secara negatif. Variabel komite kepala daerah dan ukuran pemda berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan daerah. Sedangkan variabel tindak lanjut rekomendasi audit dan kekayaan pemda tidak mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan daerah.

**Kata Kunci:** Pengungkapan Laporan Keuangan, Opini Audit, Temuan Audit, Tindak Lanjut Rekomendasi, Komitmen Kepala Daerah, Kekayaan Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah.

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....	iii
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN .....	iv
NOTA DINAS .....	.v
PENGESAHAN .....	.vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
ABSTRAK .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	xvi
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	7
1.3. Batasan Masalah .....	8
1.4. Rumusan Masalah .....	8
1.5. Tujuan Penelitian .....	9
1.6. Manfaat Penelitian .....	9
1.7. Jadwal Penelitian .....	10
1.8. Sistematika Penulisan .....	10
BAB II LANDASAN TEORI .....	12
2.1. Kajian Teori .....	12
2.1.1. Teori keagenan .....	12
2.1.2. Teori Pembelajaran Organsiasi .....	13
2.1.3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	14
2.1.4. Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Situs Web Pemerintah Daerah .....	16
2.1.5. Opini Audit .....	17
2.1.6. Temuan Audit .....	18
2.1.7. Tindak Lanjut Rekomendasi Audit .....	19
2.1.8. Komitmen Kepala Daerah .....	19
2.1.9. Kekayaan Pemerintah Daerah .....	20
2.1.10. Ukuran Pemerintah Daerah .....	21
2.2. Hasil Penelitian Yang Relevan .....	21
2.3. Kerangka Berfikir .....	30
2.4. Hipotesis .....	31
2.4.1. Pengaruh Opini Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Situs Web Pemerintah Daerah .....	31

2.4.2.	Pengaruh Temuan Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Situs Web Pemerintah Daerah.....	32
2.4.3.	Pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Situs Web Pemerintah Daerah .....	33
2.4.4.	Pengaruh Komitmen Kepala Daerah Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Situs Web Pemerintah Daerah.....	34
2.4.5.	Pengaruh Kekayaan Pemda Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Situs Web Pemerintah Daerah .....	35
2.4.6.	Pengaruh Ukuran Pemda Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Situs Web Pemerintah Daerah .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>		<b>37</b>
3.1.	Waktu dan Wilayah Penelitian.....	37
3.2.	Jenis Penelitian.....	37
3.3.	Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel.....	37
3.3.1	Populasi .....	37
3.3.2	Sampel.....	38
3.3.3	Teknik Pengambilan Sampel.....	38
3.4.	Data dan Sumber Data .....	39
3.5.	Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.6.	Variabel Penelitian.....	39
3.7.	Definisi Operasional Penelitian .....	40
3.8.	Teknik Analisis Data.....	42
3.8.1	Uji Statistik Deskriptif .....	42
3.8.2	Uji Model Penelitian .....	43
3.8.3	Analisis Regresi Logistik .....	44
3.8.4	Uji Multikolinearitas .....	46
3.8.5	Uji Hipotesis .....	46
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>48</b>
4.1	Gambaran Umum Obyek Penelitian .....	48
4.2	Pengujian dan Hasil Analisis Data.....	48
4.2.1	Statistik Deskriptif .....	48
4.2.2	Uji Model Penelitian .....	53
4.2.3	Uji Regresi Logistik .....	55
4.2.4	Uji Multikolinearitas.....	58
4.2.5	Uji Hipotesis .....	59
4.3	Pembahasan Hasil Analisis Data .....	62
4.3.1	Opini Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan .....	62
4.3.3	Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan.....	65

4.3.4	Komitmen Kepala Daerah Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan .....	67
4.3.5	Kekayaan Pemda Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan.....	69
4.3.6	Ukuran Pemda Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan.....	70
BAB V PENUTUP.....		72
5.1	Kesimpulan .....	72
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	73
5.3	Saran Penelitian .....	73
DAFTAR PUSTAKA .....		75

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	21
Tabel 3.1 Data Sampel Penelitian .....	38
Tabel 3.2 Definisi Operasional Penelitian .....	40
Tabel 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	50
Tabel 4.2 Deskriptif Statistik Variabel Dummy .....	50
Tabel.4.3 Hasil Uji Koefisiensi Determinasi ( $R^2$ ).....	54
Tabel 4.4 Hasil Uji <i>Hosmer and Lemeshow's Goodnes</i> .....	55
Tabel 4.5 <i>Uji Expectation Prediction</i> .....	56
Tabel 4.6 Hasil Uji Regresi Logistik.....	56
Tabel 4.7 <i>Odds Ratio</i> .....	57
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas .....	60
Tabel 4.9 Hasil Uji Parsial (Uji t) .....	61
Tabel 4.10 Uji <i>Overall Model Fit</i> .....	63



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 .....	2
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	30

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Data Sampe Penelitian Situs Resmi Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2021 .....	79
Lampiran 2: Tabulasi Variabel Pengungkapan Laporan Keuangan .....	82
Lampiran 3: Tabulasi Variabel Opini Audit .....	85
Lampiran 4: Tabulasi Variabel Temuan Audit .....	87
Lampiran 5: Tabulasi Variabel Tindak Lanjut Rekomendasi Audit.....	89
Lampiran 6: Tabulasi Variabel Komitmen Kepala Daerah .....	91
Lampiran 7: Tabulasi Variabel Kekayaan Pemda.....	93
Lampiran 8: Tabulasi Variabel Ukuran Pemda.....	95
Lampiran 9: Tabulasi Selluruh Variabel Penelitian .....	97
Lampiran 10: Hasil Analisis Statistik Deskriptif .....	104
Lampiran 11: Hasil Uji Regresi Logistik .....	108
Lampiran 12: Jadwal Penelitian .....	109
Lampiran 13: Daftar Riwayat Hidup .....	110
Lampiran 14: Cek Plagiasi .....	111

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi telah sangat mengubah kehidupan kita sehari-hari, termasuk cara warga setempat memperoleh informasi dari pemerintah daerahnya. Perubahan ini juga mendorong pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk lebih transparan dari sebelumnya dengan menyediakan laporan keuangan mereka di situs web mereka. Situs web ini biasa disebut dengan *e-government*. Pengungkapan informasi baik keuangan maupun non keuangan pada situs resmi pemerintah daerah dapat membantu pemerintah daerah menyampaikan informasi secara cepat, mudah, dan berbiaya rendah (Nor et al., 2019).

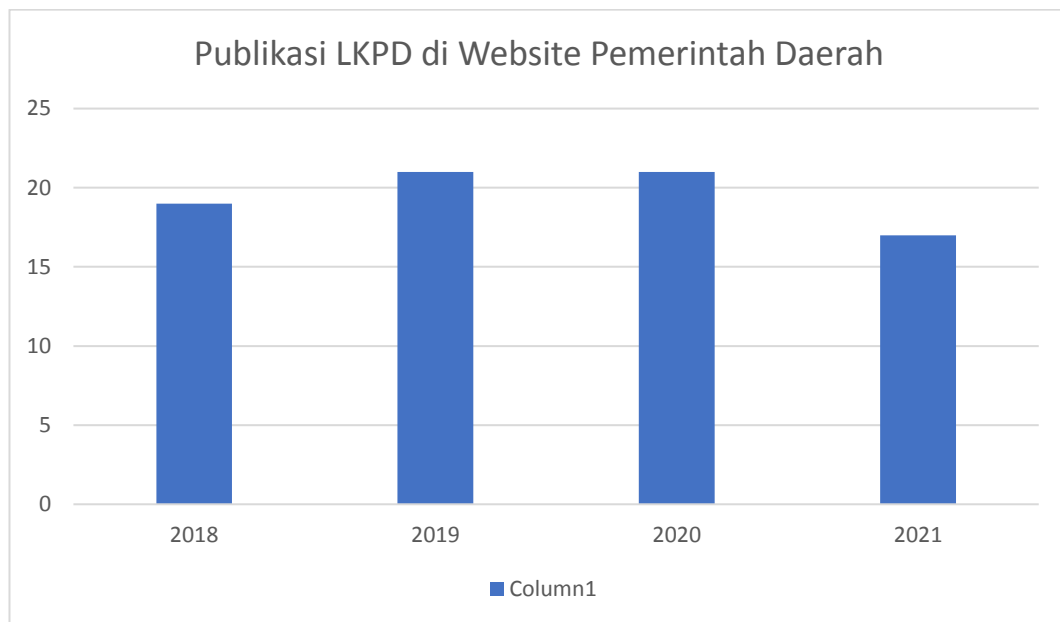
*E-Government* adalah pelayanan dan penyampaian informasi kepada masyarakat oleh pemerintah melalui situs internet (Nosihana dan Yaya, 2016). Sedangkan menurut Wilopo (2017), *E-Government* yaitu penggunaan internet sebagai salah satu cara menyampaikan informasi publik oleh pemerintah. Di Indonesia telah mulai mengembangkan *e-government* sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003.

Terdapat dua jenis Pengungkapan laporan keuangan yaitu pengungkapan wajib (*mandatory*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary*). Undang-Undang No.17 tahun 2003 yang menyatakan bahwa setiap kepala instansi pemerintahan berkewajiban menyusun dan melaporkan laporan keuangan atas instansi yang dipimpinnya (Nurhidayati dan Rahayu, 2020).

Pemprov Jawa Tengah mendapat nilai tertinggi penghargaan keterbukaan informasi publik pada 26 Oktober 2021 dari Komisi Informasi Pusat Republik

Indonesia. Jawa Tengah memperoleh penghargaan ini empat kali sejak 2018. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi pemerintah daerah terus berkembang. [www.jatengprov.go.id](http://www.jatengprov.go.id) , 26 Oktober 2021.

Gambar 1.1  
Grafik LKPD yang Publikasi di Website Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumber: Website pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah, 2023

Jawa Tengah merupakan salah satu bagian dari 10 provinsi terbaik untuk e-government. Sementara itu, tren pelaporan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) di website pemerintah daerah terus berkembang. Dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, ada 17 pemda yang mempublikasikan LKPD di Internet pada tahun 2018. Kemudian naik menjadi 21 pada tahun 2019 dan 2020 tetapi turun menjadi 17 pada tahun 2021.

Dilihat dari data tersebut sudah sebagian besar pemda di Provinsi Jawa Tengah mempublikasikan LKPD di website pemda masing-masing, tetapi dalam kenyataannya masih banyak LKPD Pemda Jawa Tengah yang tidak dapat diakses.

Ketika penulis mengakses *website* pemda sebagian tidak ada laporan keuangannya dan hanya ada sebatas mempublikasikan terkait berita-berita mengenai peraturan-peraturan, dan APBD.

Ada beberapa faktor yang diduga mempengaruhi pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan laporan keuangannya di *website* daerah, salah satunya terkait dengan audit yang dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Di Indonesia, BPK merupakan auditor eksternal yang melakukan proses audit terhadap laporan keuangan Pemerintah. Hasil akhir pemeriksaan BPK atas laporan keuangan adalah opini audit, dan opini audit tersebut diberikan atas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah. rendah (Nor et al., 2019).

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi pada situs web pemertintah daerah. Faktor pertama adalah opini audit. Menurut Nor et al. (2019) opini audit dapat mempengaruhi publikasi pengungkapan laporan keuangan di situs web pemerintah daerah. Semakin banyak penyimpangan yang ditemukan oleh BPK melalui auditnya, hal itu mungkin akan berdampak pada pengungkapan laporan keuangan mereka. Pemerintah daerah yang memiliki hasil audit buruk cenderung membuat laporan keuangannya tidak tersedia untuk umum.

Penelitian Hapsari et al., (2020) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan keuangan di internet. Penelitian Dewi dan Adi, (2019) juga menyatakan bahwa variabel opini audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap transparansi informasi keuangan. Sedangkan

penelitian Utami dan Sulardi, (2019) menyatakan bahwa variabel Opini audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan LKPD di internet.

Faktor ke dua yaitu Temuan audit. Temuan dalam laporan audit bisa berisi tentang pelanggaran pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pelanggaran atau ketidakpatuhan tersebut kemungkinan akan berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan. Temuan BPK seharusnya dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai sarana untuk mengurangi penyimpangan sehingga akuntabilitas laporan keuangan dapat diandalkan (Qowi et al., 2017). Temuan audit dapat menggambarkan baik buruknya suatu kinerja dari instansi pemerintah daerah (Masdiantini & Erawati, 2016).

Penelitian Hiola dan Harun, (2021) menyatakan bahwa temuan audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pada situs web pemerintah daerah. Sejalan dengan Penelitian Imtinan dan Hasibuan, (2021) yang menyatakan bahwa variabel temuan audit berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Sedangkan Penelitian (Nor et al., 2019) menyatakan bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan situs web pemerintah daerah dan didukung penelitian Budiarto dan Indarti, (2019) yang menemukan bahwa variabel temuan audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pada situs web pemerintah daerah.

Faktor ketiga yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan situs web pmda yaitu tindak lanjut rekomendasi audit. Menurut (Nor et al., 2019) tindak lanjut rekomendasi audit yaitu suatu proses memperbaiki atas rekomendasi

dari temuan pemeriksaan yang dilaporkan oleh BPK. Hal ini termasuk temuan terkait yang diperoleh pemeriksa baik internal maupun eksternal.

Penelitian Imtinan dan Hasibuan., (2021) menyatakan bahwa variabel tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Sedangkan Nor et al., (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel tindak lanjut audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan situs web pemerintah daerah.

Faktor ke empat yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan situs web pemda yaitu Komitmen Kepala Daerah. Komitmen pemimpin dalam organisasi atau pemerintahan menentukan suatu daya dari seseorang dalam mengidentifikasi keterlibatannya dalam suatu bidang organisasi, oleh karena itu komitmen akan menimbulkan rasa ikut memiliki bagi pekerjaan terhadap organisasi. Adanya komitmen, organisasi dapat berkembang searah dan seiring sejalan dalam usaha mewujudkan program organisasi (Adha et al., 2014).

Hasil penelitian yang dilakukan Davici., (2018) yang menghasilkan bahwa komitmen pimpinan berpengaruh signifikan positif terhadap transpaansi laporan keuangan. Hal ini berbeda dengan hasil dari penelitian (Nor et al., 2019) menunjukkan bahwa komitmen kepala daerah tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pada situs web pemerintah daerah.

Faktor ke lima yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan situs web pemda yaitu Kekayaan Pemerintah Daerah. Kekayaan daerah mencerminkan bagaimana kinerja sebuah Pemda, sehingga jika suatu Pemda memiliki kekayaan yang tinggi akan berusaha untuk menunjukkannya terhadap para stakeholders

sebagai bentuk signal dari manajemen public yang baik (Christiaensens, 1999 dalam (Hadis, 2018). Kekayaan daerah dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan semua penerimaan uang.

Hasil dari penelitian yang dilakukan Nurani., (2018) kekayaan pemda berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan laporan di internet. Sedangkan hasil dari penelitian yang dilakukan Hapsari et al., (2020) kekayaan pemda tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan di internet.

Faktor terakhir yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan situs web pemda yaitu ukuran pemerintah daerah. Aset daerah merupakan bagian atau komponen yang sangat penting dalam penyajian neraca. Aset daerah terdiri dari aset tetap dan aset lancar serta inventory. Oleh karena itu tata kelola aset daerah yang baik akan mendorong terciptanya laporan keuangan yang baik (Yusuf, 2010; Simamora dan Halim, 2013).

Penelitian Hiola dan Harun., (2021) yang didukung penelitian Penelitian Warsidi et al., (2017) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pada situs web pemerintah daerah. Berbanding terbalik dengan penelitian Andriani et al., (2019) dan Wilopo, (2017) menyatakan bahwa variabel ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini dilakukan karena terdapat penurunan publikasi LKPD di website pemda Provinsi Jawa Tengah dan penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan Nor et al., (2019)



Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini menambahkan variabel independen baru yaitu kekayaan pemerintah daerah berdasarkan penelitian Warsidi et al., (2017) dan ukuran pemerintah daerah berdasarkan pada penelitian yang dilakukan (Nurani, 2018).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, Tindak Lanjut Rekomendasi Audit, Komitmen Kepala daerah, Kekayaan Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Situs Web Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2021)”.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, dapat diidentifikasi masalah yaitu:

1. Menurunnya jumlah pemda yang mempublikasikan LKPD di website pemda pada tahun 2017 yang menyebabkan tidak transparansinya laporan keuangan pemerintah daerah
2. Adanya beberapa kabupaten/kota di provinsi Jawa tengah yang situs website / pengungkapan laporan keuangan nya tidak dapat di akses oleh masyarakat yang memberikan dampak kesulitan informasi bagi masyarakat
3. Terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian diantara penelitian-penelitian sebelumnya sehingga penelitian ini menarik untuk dianalisis kembali.

### **1.3. Batasan Masalah**

Untuk memfokuskan penelitian, maka penulis membatasi masalah yang diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Variabel yang diteliti yaitu opini audit, temuan audit, tindak lanjut rekomendasi, komitmen kepala daerah, kekayaan pemda, ukuran pemda dan pengungkapan laporan keuangan situs web pemda.
2. Penelitian dilakukan pada Kabupaten/Kota di provinsi Jawa tengah Tahun anggaran 2018-2021.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh positif opini audit terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan situs web Pemerintah Daerah?
2. Apakah terdapat pengaruh positif Temuan audit terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan situs web Pemerintah Daerah?
3. Apakah terdapat pengaruh positif tindak lanjut rekomendasi audit terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan situs web Pemerintah Daerah?
4. Apakah terdapat pengaruh positif komitmen kepala daerah terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan situs web Pemerintah Daerah?
5. Apakah terdapat pengaruh positif kekayaan pemerintah daerah terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan situs web Pemerintah Daerah?
6. Apakah terdapat pengaruh positif ukuran pemerintah daerah terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan situs web Pemerintah Daerah?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang di uraikan diatas,maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh opini audit terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan situs web Pemerintah Daerah.
2. Untuk menganalisis pengaruh temuan audit terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan situs web Pemerintah Daerah.
3. Untuk menganalisis pengaruh tindak lanjut rekomendasi audit terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan situs web Pemerintah Daerah.
4. Untuk menganalisis pengaruh komitmen kepala daerah terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan situs web Pemerintah Daerah.
5. Untuk menganalisis pengaruh kekayaan pemda terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan situs web Pemerintah Daerah.
6. Untuk menganalisis pengaruh ukuran pemda terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan situs web Pemerintah Daerah.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Hasil Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai wawasan pemikiran bagi dunia akademis dan penelitian yang selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan

memberikan bukti empiris mengenai faktor faktor yang mempengaruhi Pengungkapan laporan keuangan situs web pemda.

## 2. Bagi Pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah

Diharapkan pemerintah dapat lebih memperhatikan masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan dari aspek layanan dalam menyajikan laporan keuangan melalui media internet. Agar masyarakat lebih mudah dalam mengawasi pengelolaan keuangan pada sektor pemerintah.

### **1.7. Jadwal Penelitian**

Terlampir.

### **1.8. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan suatu pola dalam penyusunan karya ilmiah untuk memperoleh gambaran secara garis besar dari bab pertama hingga bab terakhir. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian. Penelitian ini terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

#### **BAB I           PENDAHULUAN**

Bab pertama ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II          LANDASAN TEORI**

Bab ini terdiri dari kajian teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

#### **BAB III        METODE PENELITIAN**

Bab ketiga terdiri dari waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik pengambilan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel, serta teknik analisis data.

#### BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tentang gambaran umum penelitian, pengujian dan hasil analisis data, dan pembahasan hasil analisis data (pembuktian hipotesis).

#### BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan juga saran-saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Kajian Teori**

##### **2.1.1. Teori keagenan**

Hubungan keagenan adalah kontrak di mana satu atau lebih orang (prinsipal) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian beberapa otoritas pengambilan keputusan kepada agen (Jensen, 1976)

Lupia dan McCubbins (2000) menjelaskan bahwa hubungan prinsipal dan agen berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi dan teori organisasi. Teori keagenan menganalisis pengaturan kontrak antara dua atau lebih individu, kelompok atau organisasi. Salah satu prinsipal membuat kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (agen) dengan harapan agen akan bertindak/melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud oleh prinsipal (dalam hal ini pendelegasian wewenang).

Pihak principal menginginkan informasi keuangan secara transparan dan akuntabel melalui laporan keuangan yang dipublikasikan melalui situs web pemerintah daerah. Pemerintah daerah menggunakan pihak ketiga yaitu auditor untuk menguji kelayakan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah sehingga dapat meyakinkan publik (Nor et al., 2019)

Hubungan teori agensi dalam riset ini yaitu masyarakat sebagai principal berhak memilih serta mempercayai pemerintah daerah dengan tujuan agar pemerintah dapat meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. Sedangkan

pemerintah sebagai agent memiliki kewajiban untuk mempublikasikan informasi keuangannya untuk masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban.

### **2.1.2. Teori Pembelajaran Organisasi**

Teori pembelajaran organisasi atau learning organization theory adalah “sebuah konsep dimana organisasi mampu secara terus menerus melakukan proses belajar mandiri sehingga organisasi memiliki kecepatan berpikir dan bertindak dalam merespon berbagai perubahan yang muncul (Senge, 1990). Teori ini menunjukkan bahwa seharusnya sebuah organisasi institusional perlu untuk mengembangkan kapasitas anggotanya untuk menciptakan hasil yang benar-benar mereka targetkan, penanaman pola berpikir baru, pemberian kebebasan pengungkapan aspirasi dan para anggotanya secara terus-menerus belajar untuk mempelajari sesuatu secara bersama-sama. (Senge, 1990)

Teori pembelajaran organisasi mempunyai pendapat bahwa sebuah organisasi harus memiliki kinerja dan tujuan yang didalamnya harus ada hubungan dan proses yang berkelanjutan antara anggota dengan anggota ataupun anggota dengan tim. Teori ini jika dihubungkan dalam penelitian ini dapat menjelaskan bahwa sebuah institusi pemerintah dalam lingkup daerah sangat perlu untuk mengikuti sebuah pembelajaran dan perkembangan teknologi. Pemerintah daerah perlu untuk memperbaiki dan merespon berbagai perubahan yang muncul dan dibutuhkan masyarakat yang salah satunya adalah kebutuhan masyarakat akan akses informasi laporan keuangan pemerintah daerah yang tersedia.

### **2.1.3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu Ivana, (2018). Untuk menyusun LKPD ini, Pemerintah Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pemerintah Daerah menerapkan SAP Berbasis Akrual dalam menyusun dan menyajikan LKPD.

Menurut Nosihana dan Yaya, (2016) mendefinisikan Laporan keuangan adalah bentuk nyata dari akuntabilitas dan pertanggungjawaban dari pemerintah untuk masyarakat, sehingga data yang disampaikan haruslah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan tidak ada manipulasi anggaran yang nantinya dapat merugikan masyarakat. Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran mempertunjukkan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah local yang menggambarkan antara perbandingan anggaran dan realisasinya. Komponen dalam LRA yaitu terdiri dari pendapatan LRS, belanja transfer, dan pembiayaan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan perubahan saldo anggaran lebih memberikan informasi terkait



kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menyajikan tentang posisi keuangan suatu entitas pelaporang terkait aset, kewajiban, dan ekuitas tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi beban akrual yang digunakan untuk menghitung biaya per program atau pelayanan. Unsur yang dicakup terdiri dari pendapatan LO, beban, transfer, surplus/deficit-LO bila ada dan pos-pos luar biasa.

5. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas yaitu penerimaan dan pengeluaran kas.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan yang menyajikan informasi terkait kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan atas laporan keuangan menyajikan penjelasan dari analisis dalam suatu pos yang disajikan pada laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.

#### **2.1.4. Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Situs Web Pemerintah Daerah**

Menurut Nor et al., (2019) pengungkapan laporan keuangan oleh pemerintah daerah melalui internet adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat yang paling murah, cepat dan efisien. Meskipun terdapat undang-undang yang mengatur tentang transparansi oleh pemerintah daerah kepada masyarakat masih terdapat beberapa pemerintah daerah yang tidak melaporkan informasi keuangan secara lengkap dalam website resminya.

Perkembangan teknologi dan sistem informasi juga mempengaruhi sistem pemerintahan di Indonesia. Saat ini, berbagai kegiatan manajemen keuangan baik di pusat maupun di pemerintah daerah telah didukung oleh sistem teknologi yang memadai. Tujuannya adalah agar laporan keuangan pemerintah dilaporkan tepat waktu. Selain dapat menyajikan laporan keuangan tepat waktu, teknologi dan informasi adalah cara bagi pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan lokal (Nor et al., 2019)

Teknologi seperti internet dapat digunakan untuk melaporkan laporan keuangan. Sejalan dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa badan publik harus terbuka dan bertanggung jawab atas informasi publik apapun (Nor et al., 2019). Tingkat pengungkapan informasi berkaitan dengan seberapa banyak informasi yang harus diungkapkan, baik kepada pihak internal maupun eksternal. Pengungkapan informasi pada situs resmi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu bentuk

pengungkapan dan pelaksanaan dari e-government di Indonesia (Murni et al., 2017).

Penggunaan internet dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas bagi pemerintah daerah. Selaras dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa badan publik harus terbuka dan bertanggung jawab atas informasi publik apapun (Alhajjriana, Nor, dan Wijaya, 2018). Tingkat penyampain informasi berhubungan dengan seberapa banyak informasi yang disampaikan, baik untuk pihak internal ataupun eksternal.

#### **2.1.5. Opini Audit**

Opini merupakan pernyataan profesional auditor mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Hal ini dijelaskan dalam UU No. 15 Tahun 2004 bahwa pendapat yang dibuat BPK adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan empat kriteria kepatuhan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan dan efektivitas sistem pengendalian intern (Nor et al., 2019).

Pengukuran variabel dilihat dari skala 1 sampai 5 dengan melihat opini audit “ 1. Untuk opini tidak memberikan pendapat (TMP), 2. Untuk opini Tidak Wajar (TW), 3. Untuk opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), 4. Untuk opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP DPP), DAN 5. Untuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (Nor et al., 2019).

Pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP atas LKPDnya cenderung melakukan publikasi laporan keuangan melalui website untuk

menunjukkan sinyal kualitas pengelolaan keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, pemerintah daerah yang memperoleh opini audit selain WTP dapat menimbulkan persepsi akan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga pemerintah daerah cenderung menutupi informasi laporan keuangannya. Penelitian (Nor et al., 2019) yang menyatakan bahwa opini audit memiliki pengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah di website.

#### **2.1.6. Temuan Audit**

Menurut Khasanah dan Rahardjo, (2014) menjelaskan bahwa temuan audit yaitu pelanggaran yang ditemukan BPK dalam LKPD atas ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku. Temuan audit akan berbanding lurus dengan tingkat pengungkapan laporan keuangan yang disampaikan dalam CALK.

Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat sejumlah temuan pemeriksaan. Setiap temuan dapat terdiri dari satu atau lebih masalah yang berkaitan dengan kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan atau peraturan terkait. Rincian temuan audit biasanya berkaitan dengan temuan kerugian negara, temuan potensi kerugian, dan temuan administratif (Nor et al., 2019)

Penelitian dari Rahayu & Mardiana, (2016) menunjukkan bahwa nilai temuan audit memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan. Terjadinya hubungan negatif ini berarti jika nilai temuan pemeriksaan yang didapat oleh BPK banyak belum tentu terjadi peningkatan

pengungkapan yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap peningkatan pada laporan keuangannya.

#### **2.1.7. Tindak Lanjut Rekomendasi Audit**

Tindak lanjut rekomendasi audit didefinisikan sebagai proses untuk menentukan kecukupan, efektivitas dan ketepatan waktu tindakan korektif yang dilakukan oleh manajemen terhadap rekomendasi dari temuan pemeriksaan yang dilaporkan. Termasuk terkait temuan yang diperoleh pemeriksa baik internal maupun eksternal.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara dan wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Hartono (2006) mengemukakan bahwa tindak lanjut rekomendasi audit merupakan elemen penting dalam penilaian kinerja manajemen.

Kecepatan pemerintah daerah dalam melakukan tindak lanjut rekomendasi audit akan berdampak pada keinginan untuk mengungkapkan laporan keuangannya di situs web pemerintah sebagai bentuk perbaikan dan kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan yang berlaku (Nor et al., 2019)

#### **2.1.8. Komitmen Kepala Daerah**

Komitmen adalah kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi. Hal ini mencakup cara-cara mengembangkan tujuan atau memenuhi kebutuhan organisasi yang intinya mendahulukan misi organisasi dari pada kepentingan pribadi. Komitmen dapat juga berarti penerimaan yang kuat individu terhadap tujuan dan

nilai-nilai organisasi, dan individu berupaya serta berkarya dan memiliki hasrat yang kuat untuk tetap bertahan di organisasi tersebut.

Rendahnya komitmen mencerminkan kurangnya tanggung jawab seseorang dalam menjalankan tugasnya. Ukuran komitmen seorang pimpinan yang dalam hal ini adalah pimpinan SKPD adalah terkait dengan pendelegasian wewenang (*empowerment*). Dalam konsep ini pimpinan dihadapkan pada komitmen untuk mempercayakan tugas dan tanggung jawab ke bawahan. Sebaliknya, bawahan perlu memiliki komitmen untuk meningkatkan kompetensi diri.

#### **2.1.9. Kekayaan Pemerintah Daerah**

Kekayaan daerah mencerminkan bagaimana kinerja sebuah Pemda, sehingga jika suatu Pemda memiliki kekayaan yang tinggi akan berusaha untuk menunjukkannya terhadap para *stakeholders* sebagai bentuk signal dari manajemen public yang baik. (Christiaensens, 1999 dalam Puspita dan Martani 2010). Kekayaan daerah yang kecil menunjukkan kinerja pemerintah yang buruk. Pemda yang memiliki kinerja yang buruk akan menghindari pengungkapan sukarela dan akan lebih memilih untuk membatasi akses informasi kepada masyarakat.

Laporan keuangan merupakan salah satu sinyal informasi manajemen kepada principal (Godfrey, 2007). Oleh karena itu, semakin baik kinerja manajemen pemerintah daerah seharusnya semakin baik pula pengungkapan laporan keuangannya. Adapun PAD merupakan salah satu akun dari laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Oleh karena itu, dapat

disimpulkan bahwa semakin tinggi PAD maka seharusnya semakin baik pula pengungkapan informasi keuangan daerah.

Kekayaan daerah dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah equitas dana. PAD terdiri dari: (1) Pajak daerah, (2) Retribusi daerah, (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) Lain-lain PAD yang sah.

#### **2.1.10. Ukuran Pemerintah Daerah**

Semakin besar aset yang dimiliki suatu daerah menandakan semakin besar juga ukuran Pemda tersebut. Aset dapat mewakili seberapa besar pemerintahan, semakin besar aset maka semakin banyak modal yang ditanam. Maka dari itu ukuran Pemda yang besar mengindikasikan terdapat jumlah kekayaan yang besar pula, pengawasan dari masyarakat akan kegiatan pemerintah akan semakin ketat pula karena terdapat kekhawatiran adanya penyelewengan dana yang mungkin saja terjadi.

#### **2.2. Hasil Penelitian Yang Relevan**

Dalam sub-bab ini akan dijelaskan mengenai penelitian-penelitian terdahulu mengenai Opini audit, Ukuran Pemda, Kekayaan Pemda terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Situs Web Pemda yang dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian-penelitian terdahulu disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti / Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Hiola dan Harun, (2021)	Pengaruh karakteristik, kompleksitas, dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah provinsi Gorontalo.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Populasi dan sampel pemerintah provinsi Gorontalo tahun 2018-2020.</li> <li>2. Teknik analisis Metode regresi linier berganda</li> <li>3. Penelitian Kuantitatif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Variabel ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian, ukuran legistalif, temuan audit berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah</li> <li>2. Variabel pendapatan transfer, jumlah OPD tidak berpengaruh signifikan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.</li> </ol>
2	Dini Wahjoe Hapsari, Dhita Aira Juantika, Daniel TH Manurung, dan Noviansyah Rizal (2020)	<i>Implementation of Regional Financial Statements using Internet Financial Reporting</i>	1. Populasi dan sampel 65 laporan keuangan dari 13 situs resmi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2014 – 2018.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Variabel Utang pemerintah dan opini audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan keuangan di internet.</li> <li>2. Variabel kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap</li> </ol>



			<p>2. Teknik analisis Metode regresi data panel.</p> <p>3. Penelitian Kuantitatif</p>	<p>pengungkapan keuangan di internet.</p>
3	(Hadianto dan Murtin, 2020)	<p>Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan <i>Internet Financial Reporting</i> (IFR) di Indonesia</p>	<p>1. Populasi dan Sampel Jumlah sampel 66 daerah dari jumlah penduduk seluruh pemerintah daerah</p> <p>2. Teknik Analisis analisis regresi linier berganda</p> <p>3. Penelitian kuantitatif</p>	<p>1. Variabel kompetensi politik dan kekayaan daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan IFR.</p> <p>2. Variabel ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan IFR.</p> <p>3. Variabel <i>debt financing</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan IFR.</p> <p>4. Variabel pendapatan per kapita dan opini audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan</p>

				terhadap pengungkapan IFR.
4	(Imtinan & Hasibuan, 2021)	Pengaruh Temuan Audit Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Kementerian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Populasi dan sampel dan Sampel penelitian terdiri dari Kementerian di Indonesia di Tahun 2016-2018.</li> <li>2. Teknik analisis Regresi berganda</li> <li>3. Penelitian kuantitatif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Variabel Variabel temuan audit berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.</li> <li>2. Variabel tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.</li> </ol>
5	Wahyudi Nor, Muhammad Hidayana, dan Rifqi Novriyandana (2019)	<i>Financial statements disclosure on indonesian local government websites A quest of its determinant(s)</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Populasi dan sampel 34 pemerintah daerah di seluruh indonesia dengan menggunakan metode sensus.</li> <li>2. Teknik analisis Regresi logistic</li> <li>3. Penelitian Kuantitatif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Variabel Opini audit berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan situs web pemerintah daerah.</li> <li>2. Variabel temuan audit, tindak lanjut audit, tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan, komitmen kepala daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan situs web</li> </ol>

				pemerintah daerah.
6	Viona Indra Dewi dan Priyo Hari Adi (2019)	Pengaruh Tingkat Pendidikan, Jumlah Penduduk, dan Opini Audit Terhadap Transparasi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Populasi dan sampel penelitian ini berjumlah 35 kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>2. Teknik analisis Regresi linier berganda</li> <li>3. Penelitian Kuantitatif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Variabel tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif signifikan.</li> <li>2. Variabel Opini audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap transparansi informasi keuangan.</li> <li>3. Variabel Jumlah penduduk berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah.</li> </ol>
7	Shafira Ramadhia utami dan Sulardi (2019)	Pengaruh karakteristik pemerintah daerah, opini audit, dan rasio kemandirian terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Populasi dan sampel penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan auditan Pemda pada tahun 2017. Sampel penelitian ini adalah Pemda yang dipilih</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Variabel populasi berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan LKPD</li> <li>2. Variabel IPM berpengaruh positif terhadap pengungkapan LKPD</li> <li>3. Variabel Opini</li> </ol>

			<p>dengan menggunakan metode sampling</p> <p>2. Teknik analisis model regresi berganda</p> <p>3. Penelitian Kuantitatif</p>	<p>audit dan Rasio kemandirian tidak berpengaruh terhadap pengungkapan LKPD</p>
8	Andriani, Santi, Mustika (2019)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014-2016	<p>1. Populasi dan sampel penelitian ini berjumlah 19 kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>2. Teknik analisis Regresi linier berganda</p> <p>3. Penelitian Kuantitatif</p>	<p>1. Variabel ukuran legislatif dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.</p> <p>2. ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan, umur pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, diferensiasi fungsional dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.</p>
9	(Yulia, 2018)	Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Kompleksitas Pemerintahan, dan Tingkat	<p>1. Populasi dan sampel Populasi seluruh pemerintah kabupaten / kota tahun</p>	<p>1. Variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh</p>

		Kesejahteraan Daerah Terhadap Tingkat pengungkapan sukarela informasi keuangan pada website pemerintah daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi Se – Indonesia)	2014. 2. Teknik analisis Metode regresi berganda 3. Penelitian Kuantitatif	terhadap tingkat pengungkapan sukarela informasi keuangan pada website pemerintah daerah 2. Variabel kompleksitas pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela informasi keuangan pada website pemerintah daerah 3. Variabel tingkat kesejahteraan daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Sukarela informasi keuangan pada website pemerintah daerah
10	Nadia Davici (2018)	PENGARUH TEKANAN EKSTERNAL, KOMITMEN PIMPINAN	1. Populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu 25 OPD Kabupaten	1. Variabel tekanan eksternal tidak berpengaruh signifikan terhadap

		DAN FAKTOR POLITIK TERHADAP TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Agam)	Agam. 2. Teknik analisis Regresi linier berganda 3. Penelitian Kuantitatif	transparansi laporan keuangan. 2. Variabel komitmen pimpinan berpengaruh signifikan positif terhadap transpaansi laporan keuangan. 3. Variabel faktor politik berpengaruh signifikan positif terhadap transparansi laporan keuangan.
11	Warsidi, Rizkiyaningsih, W., Rusmana, O., dan Sukirman. (2017).	Determinants of Internet Financial Reporting in Indonesian Local Governments.	1. Populasi dan sampel Populasidalam penelitian ini adalah pemerintah daerah di Indonesia. menggunakan metode sampling 2. Teknik analisis regresi berganda 3. Penelitian kuantitatif	1. Variabel kompetisi politik, Ukuran pemda, kekayaan berpengaruh positif terhadap pelaporan keuangan internet oleh pemerintah daerah. 2. Ketergantungan dan tipe pemerintah daerah tidak berpengaruh positif terhadap pelaporan keuangan internet oleh pemerintah daerah di Indonesia.
12	Indra Agung	Analisis Faktor-Faktor	1. Populasi dan sampel	1. Variabel kesejahteraan

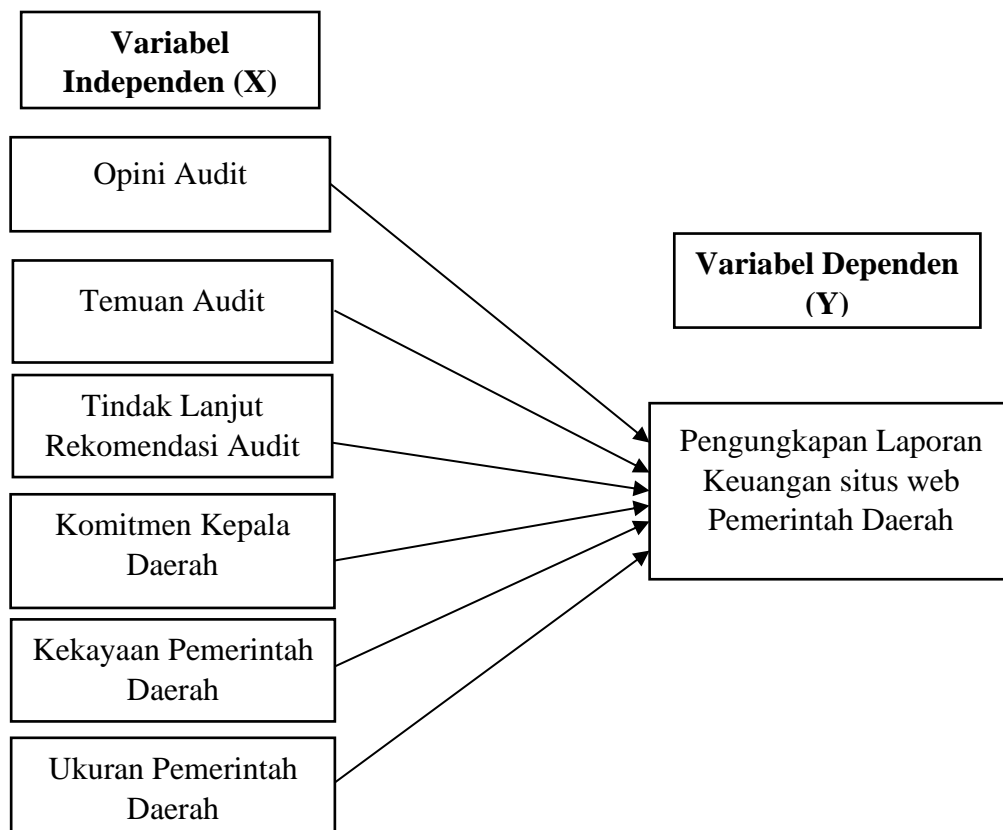
	Wilopo (2017)	yang Mempengaruhi Akuntabilitas dan Transparansi Informasi Keuangan Daerah Melalui Website	<p>sampel sebesar 25 pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2015</p> <p>2. Teknik analisis regresi berganda</p> <p>3. Penelitian kuantitatif</p>	<p>masyarakat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan yang transparan melalui website pemerintah daerah.</p> <p>2. Variabel pendapatan daerah, ukuran pemerintah daerah, kompleksitas pemerintah, belanja daerah, rasio pembayaran utang, dan kualitas laporan keuangan berpengaruh tidak signifikan.</p>
13	Ariefia Nosihana dan Rizal Yaya (2016)	<i>Internet Financial Reporting</i> dan Faktor-Faktor yang mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia	<p>1. Populasi dan sampel Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh pemda di Indonesia pada tahun 2014. Sampel penelitian ini adalah Pemda yang dipilih dengan menggunakan metode sampling</p> <p>2. Teknik analisis model regresi berganda</p>	<p>1. Variabel kompetensi politik, ukuran pemda, berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan diinternet.</p> <p>2. Variabel rasio pembayaran hutang, kekayaan pemda, tipe pemda, dan opiniaudit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan</p>

			3. Penelitian Kuantitatif	laporan keuangan di internet.
--	--	--	---------------------------	-------------------------------

### 2.3. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir menunjukkan pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam penelitian ini memiliki satu variabel dependen yaitu pengungkapan laporan keuangan situs web pemerintah daerah dan tiga variabel independen yaitu opini audit (X1), temuan audit (X2), tindak lanjut rekomendasi audit (X3), komitmen kepala daerah (X4), kekayaan pemerintah daerah (X5), ukuran pemerintah daerah (X6). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat sebagaimana gambar berikut ini:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**





## **2.4. Hipotesis**

### **2.4.1. Pengaruh Opini Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Situs Web Pemerintah Daerah**

Teori Agency menjadi landasan dalam penelitian ini untuk menjelaskan variabel opini audit. Pengungkapan laporan hasil audit yang dilakukan BPK dalam bentuk opini audit menunjukkan bentuk transparansi kepada publik (Nor et al., 2019). Adanya pengungkapan hasil audit ini menjadi bentuk pertanggungjawaban pihak pemerintah kepada masyarakat.

K. Styles, (2007) mengungkapkan bahwa pemerintah daerah yang telah mendapat penghargaan dari organisasi eksternal atas praktek pelaporan keuangannya cenderung akan menyajikan laporan keuangannya di internet. Opini audit dalam laporan keuangan terdiri dari: Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pendapat BPK yang baik tentang laporan keuangan pemerintah daerah akan mengarah pada kecenderungan yang lebih tinggi bagi pemerintah daerah untuk menerapkan praktik pelaporan keuangan untuk menunjukkan kepada publik kemampuan dan komitmennya sesuai dengan SAP. Kecenderungan melaporkan keuangan pemerintah setelah diaudit sejalan dengan teori keagenan yang artinya pemerintah telah mendapat mandat dari masyarakat untuk mempertanggungjawabkan kinerja.

Menurut Handayani (2010) dalam Nor et al., (2019) menemukan bahwa tingkat penyimpangan yang terjadi pada suatu entitas akan berdampak negatif

terhadap tingkat pengungkapan. Suatu entitas kemungkinan besar tidak akan mengungkapkan informasi tersebut jika tingkat penyimpangan semakin tinggi. Hasil penelitian dari Nor et al., (2019) dan Murni et al., (2017) menemukan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan situs web pemerintah daerah. Dengan penjelasan diatas, peneliti menduga bahwa:

H1 : Opini Audit berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Situs Web Pemerintah Daerah.

#### **2.4.2. Pengaruh Temuan Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Keuangan Pada Situs Web Pemerintah Daerah**

Teory agency juga menjelaskan terkait variabel temuan audit. Teori tersebut menjelaskan hubungan kontrak antara principal dan juga pihak agen. Salah satu prinsipal membuat kontrak dengan pihak agen dengan harapan agen dapat menjalankan pekerjaannya sesuai dengan yang diharapkan oleh principal (Nor et al., 2019). Adanya temuan audit berdasarkan BPK, mengharuskan pemerintah daerah untuk segera ikuti temuan tersebut. Temuan audit mengindikasikan bahwa masih banyak terjadi kesalahan dalam menyusun laporan keuangan.

Penelitian (Rahayu & Mardiana, 2016) menunjukkan bahwa nilai temuan audit memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan. Terjadinya hubungan negatif ini berarti jika nilai temuan pemeriksaan yang didapat oleh BPK banyak belum tentu terjadi peningkatan pengungkapan yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap peningkatan pada laporan keuangannya.

Hal ini sejalan dengan hasil riset Naopal et al. (2017), dan Imtinan dan Hasibuan, (2021) menunjukkan bahwa temuan audit berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pada situs web pemerintah daerah. Dengan penjelasan tersebut, peneliti menduga:

H2 : Temuan Audit Berpengaruh Negatif Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Situs Web Pemerintah Daerah

#### **2.4.3. Pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Situs Web Pemerintah Daerah**

Hubungan keagenan yaitu pelimpahan wewenang dari masyarakat kepada wakilnya di DPR, dari DPR ke pemerintah. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan apa yang dikelolanya kepada masyarakat. Pemerintah daerah yang melakukan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi BPK sebagai bukti tanggungjawabnya kepada principal dalam memperbaiki kualitas laporan keuangannya. Laporan tindak lanjut hasil temuan dan rekomendasi memperlihatkan kualitas dari laporan hasil pemeriksaan.

Menurut Setyaningrum (2015) menyatakan bahwa semakin banyaknya rekomendasi yang dilakukan oleh pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang terwakili pada tingkat pengungkapan yang semakin tinggi. Semakin banyak pemeriksaan lanjutan yang dilakukan, semakin baik pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hal ini seperti penelitian yang dilakukan Imtinan dan Hasibuan, (2021) menunjukkan bahwa tindak lanjut rekomendasi audit berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan daerah.

H3 : Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Berpengaruh Positif Terhadap Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Situs Web Pemerintah Daerah

#### **2.4.4. Pengaruh Komitmen Kepala Daerah Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Situs Web Pemerintah Daerah**

Teori pembelajaran organisasi dapat menjelaskan terkait variabel komitmen kepala daerah terhadap pengungkapan LKPD. Kepala daerah sebagai pemegang otoritas tertinggi, pemimpin bukan sekedar dapat mempengaruhi pemanfaatan semua sumber daya yang tersedia untuk implementasi kebijakan, tapi jauh melampaui itu juga mempunyai power yang dapat digunakan untuk memaksa sumber daya yang lain.

Komitmen kepala daerah mengenai pelaporan LKPD yang sekiranya dapat memberikan sebuah informasi yang penting untuk masyarakat perlu dilakukan atas dasar evaluasi yang telah dilakukan. Kepala daerah juga harus dapat untuk memiliki kecepatan berfikir dan bertindak sebagai sebuah respon terhadap perubahan. Perbaikan dan sebuah keputusan dalam evaluasi kepemimpinan perlu dilakukan sebagai wujud pembelajaran secara bertahap dan sebuah proses untuk hal yang lebih baik.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Arsyadi Ridha dan Hardo Basuki (2012) menemukan bahwa komitmen berpengaruh dan signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

H4 : Komitmen kepala daerah Berpengaruh Positif Terhadap Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Situs Web Pemerintah Daerah.

#### **2.4.5. Pengaruh Kekayaan Pemda Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Situs Web Pemerintah Daerah**

Kekayaan daerah yang kecil menunjukkan kinerja pemerintah yang buruk, sedangkan Pemda yang memiliki kinerja yang buruk akan menghindari pengungkapan sukarela dan akan lebih memilih untuk membatasi akses informasi kepada masyarakat. Pemda yang berkinerja baik akan mengungkapkan informasi lebih banyak dan menggunakan teknik pengungkapan yang lebih baik sesuai dengan teori signaling. Penelitian sebelumnya oleh Rahman et al., (2013), Carlos et al., (2008) dan Trisnawati dan Achmad, (2014) menyatakan bahwa publikasi laporan keuangan pada *e-government* menyampaikan hasil kerjanya dengan mudah dan murah.

H5 : Kekayaan Pemda Berpengaruh Positif Terhadap Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Situs Web Pemerintah Daerah.

#### **2.4.6. Pengaruh Ukuran Pemda Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Situs Web Pemerintah Daerah**

Ukuran Pemda maksudnya adalah mengenai jumlah aset yang dimiliki dan ditangani oleh Pemda (Wilopo, 2017). Semakin besar aset yang dimiliki suatu daerah menandakan semakin besar juga ukuran Pemda tersebut. Aset dapat mewakili seberapa besar pemerintahan, semakin besar aset maka semakin banyak modal yang ditanam. Maka dari itu ukuran pemda yang besar mengindikasikan terdapat jumlah kekayaan yang besar pula, pengawasan dari masyarakat akan kegiatan pemerintah akan semakin ketat pula karena terdapat kekhawatiran adanya penyelewengan dana yang mungkin saja terjadi (Nosihana & Yaya, 2016)

Daerah yang memiliki jumlah penduduk yang besar akan mengalami pengawasan publik yang besar serta *stakeholder* yang lebih beragam. Para pemangku kepentingan yang beragam ini memiliki kebutuhan informasi yang beragam pula. Oleh karena itu besarnya tanggungjawab pelayanan yang diberikan, serta besarnya tekanan permintaan atas informasi pelaksanaan pemerintah, maka pemda yang memiliki ukuran yang lebih besar akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak.

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh tingkat ukuran pemerintah daerah terhadap pengungkapan laporan keuangan situs web pemerintah daerah. Hasil penelitian Martani, Fitriyani dan Annisa (2014) menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan situs web pemerintah daerah. Dengan penjelasan tersebut, peneliti menduga:

H6 : Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan situs web pemerintah daerah.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di website Pemerintah Daerah. Objek dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dimulai dari tahun 2018-2021. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan situs web pemerintah daerah. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2022 sampai selesai.

### **3.2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Riset kuantitatif yaitu riset yang menjelaskan hubungan antara variabel terhadap objek yang lebih bersifat sebab dan akibat (Sugiyono 2017). Oleh karena itu dalam penelitian kuantitatif terdapat variabel dependen dan variabel independen. Dari variabel tersebut nantinya akan dicari seberapa besar pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen.

### **3.3. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel**

#### **3.3.1 Populasi**

Populasi merupakan seluruh jumlah dari subjek yang akan di teliti oleh seorang peneliti. Populasi penelitian ini adalah semua situs resmi pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 kabupaten atau kota pada tahun 2018-2021.

### 3.3.2 Sampel

Sampel merupakan bagian kecil dari populasi itu sendiri yang di ambil sebagai objek dalam sebuah pengamatan atau penilaian yang dianggap mampu mewakili populasi.

Tabel 3.1  
Data Sampel Penelitian

Tahun	Sampel Penelitian
2018	35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
2019	35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
2020	35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
2021	35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
Total	140 Data Sampel

### 3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling. *Purposive sampling* yaitu sampel yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti (Sugiyono 2017). Purposive Sampling merupakan teknik pengambilan data dengan menggunakan kriteria. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah yang memiliki website resmi yang masih aktif
2. Pemerintah kabupaten/kota yang dijadikan sampel harus mempublikasikan LKPD yang telah diaudit oleh BPK melalui website masing-masing pemma dalam kurun waktu 2018-2021.



### **3.4. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang sumber datanya didapatkan secara tidak langsung ke pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2017). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan hasil pemeriksaan (LHP) laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten se-Jawa Tengah dalam periode 2018-2021 yang di dapatkan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Jawa Tengah

Sumber data dari penelitian ini yaitu dari: *Website* resmi pemerintah kabupaten dan kota, *Website* Kemendagri (<https://www.kemendagri.go.id/>), dan *Website* BPK-RI (<https://www.bpk.go.id/>).

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dari dokumen yang sudah tersedia yaitu berasal dari lembaga yang mengeluarkan data tersebut dan juga diambil dari internet atau website resmi pemerintah daerah.

### **3.6. Variabel Penelitian**

#### **3.6.1 Variabel Dependen (Y)**

Variabel dependen atau variabel output, kriteria, konsekuen. Menurut Sugiyono (2016 : 39 ) Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau variabel yang menjadi akibat dari adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu pengungkapan laporan keuangan pada situs web pemerintah daerah.

### 3.6.2 Variabel Independen (X)

Variabel independen atau biasa disebut sebagai variabel *stimulus, predictor, antecedent*. Menurut Sugiyono (2016 : 39 ) Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu opini audit, temuan audit, tindak lanjut rekomendasi audit, komitmen kepala daerah, kekayaan pemerintah daerah, dan ukuran pemerintah daerah.

### 3.7. Definisi Operasional Penelitian

Tabel 3.2  
Definisi Operasional Penelitian

No	Variabel	Definisi	Indikator
1.	Pengungkapan laporan keuangan situs web pemerintah (Y)	Sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa “setiap entitas publik harus memanfaatkan dan mengembangkan teknologi informasi untuk menyampaikan informasi kepada publik secara publik” (Nor, Hudaya, dan Novriyandana, 2019).	Menggunakan variabel biner atau dummy. Nilai “1” untuk LKPD yang dipublis, sedangkan nilai “0” untuk LKPD yang tidak dipublikasikan (Nor, Hudaya, dan Novriyandana, 2019).
2.	Opini Audit (X)	Opini Audit adalah pernyataan yang dikeluarkan BPK atas LKPD yang telah diaudit. (Nor, Hudaya, dan Novriyandana, 2019).	Dilihat dari skala 1 sampai 5 opini audit 1. Untuk opini tidak memberikan pendapat (TMP) 2. Untuk opini Tidak Wajar (TW) 3. Untuk opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 4. Untuk opini Wajar Tanpa

			<p>Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP DPP)</p> <p>5. Untuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).</p> <p>TMP = 1 ; TW =2 ; WDP = 3 ; WTP DPP = 4 ; WTP = 5</p> <p>(Nor, Hudaya, dan Novriyandana 2019)</p>
3.	Temuan Audit (X2)	Temuan pemeriksaan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku baik pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ditemukan oleh pemeriksa pada saat pemeriksaan (Liestiani, 2008)	Jumlah temuan audit dalam laporan keuangan daerah pada tahun penelitian ( Prastyaningsih 2015)
4.	Tindak Lanjut Rekomendasi Audit (X3)	Tindak lanjut rekomendasi audit merupakan suatu proses perbaikan yang dilakukan karena adanya temuan pemeriksaan yang dilaporkan BPK (Nor, Hudaya, dan Novriyandana 2019).	<p>Jumlah rekomendasi dikurangi jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, tindak lanjut yang belum selesai tidak sesuai dan rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. tindak lanjut dibagi dengan jumlah total rekomendasi.</p> $\frac{Z_{rkm} - (Z_{btl} + Z_{bstl} + Z_{tdtl})}{Z_{rkm}} \times 100\%$ <p>(Nor, Hudaya, dan Novriyandana 2019)</p>
5.	Komitmen Kepala Daerah (X4)	Komitmen kepala daerah adalah transparansi pengelolaan anggaran atau keuangan daerah dalam	Variabel komitmen kepala daerah diukur dengan menggunakan biner: 0 untuk “kepala daerah yang tidak memiliki komitmen visi misi mengelola tata kelola yang

		penyelenggaraan pemerintahannya (Nor, Hudaya, dan Novriyandana 2019).	baik” dan 1 untuk “kepala daerah yang memiliki komitmen visi misi mengelola tata kelola yang baik dan transparan.” (Nor, Hudaya, dan Novriyandana 2019)
6.	Kekayaan Pemda (X5)	Kekayaan Pemda di definisikan pada seberapa besar pendapatan asli daerah tersebut. ( Nosihana dan Yaya 2016)	$\frac{\text{Total PAD}}{\text{Jumlah penduduk}}$ (Nosihana dan Yaya 2016)
7.	Ukuran Pemda (X6)	Size adalah suatu nominal yang dapat mendeskripsikan sesuatu. Ukuran organisasi menunjukkan besar kecilnya organisasi tersebut begitu pula ukuran pemerintah daerah juga menunjukkan seberapa besar pemerintah daerah tersebut (Kusumawardani, 2012).	Ukuran pemerintah daerah dalam penelitian ini diukur menggunakan ukuran yang sama dengan penelitian Wilopo (2017), yaitu sebagai berikut :  <i>Ukuran Pemerintah Daerah = Ln Total Aset</i>

### 3.8. Teknik Analisis Data

#### 3.8.1 Uji Statistik Deskriptif

Data dalam riset ini diolah dan dianalisis menggunakan alat Statistik deskriptif. Statistis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan berlaku umum. Penyajian data dalam statistik deskriptif yaitu melalui tabel, grafik, yang umumnya menggunakan histogram kemudian pengukuran tendensi sentral, perhitungan desil, persentil, perhitungan

penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan persentase (Sugiyono, 2017).

### 3.8.2 Uji Model Penelitian

#### 1. Koefisien Determinan (Mc Fadden R-Squared)

Pengujian Nilai *Mc Fadden R-Squared* merupakan pengujian koefisien determinan ( $R^2$ ). Pengujian *Mc Fadden R-Squared* digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen (x) terhadap variabel dependen (y). Nilai *Mc Fadden R-squared* yang besar berarti bahwa variabel independen dalam penelitian mampu memberikan pengaruh besar terhadap variabel dependennya. Sebaliknya jika nilai *Mc Fadden R-squared* kecil berarti variabel independen dalam penelitian memberikan pengaruh terhadap variabel dependennya rendah (Ghozali dan Ratmono, 2017).

#### 2. Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit Test)

Kelayakan model regresi (*goodness of fit*) ini dinilai menggunakan *Hosmer and Lemeshow Test* (Nor, Hudaya, and Novriyandana 2019). Pengujian ini digunakan untuk menguji apakah data empiris sesuai dengan model. Pengujian hipotesis untuk menilai fit sebagai berikut :

H<sub>0</sub> : Tidak terdapat perbedaan model dengan data penelitian (model fit) H<sub>1</sub> : Ada perbedaan antara model dengan data penelitian (model tidak fit)

Apabila nilai *Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit Test*  $> 0.05$ , artinya H<sub>0</sub> diterima (model mampu menjelaskan nilai observasinya) Sebaliknya apabila nilai *Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit Test*  $< 0,05$ , maka H<sub>0</sub> ditolak yang

berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga dikatakan model tidak baik karena model tersebut tidak mampu memprediksi nilai observasinya (Nor, Hudaya, and Novriyandana 2019).

### 3. Akurasi Model (Expectation-Prediction Evaluation)

Penelitian ini menggunakan Pengujian akurasi model atau *expectation-prediction evaluation* dilakukan untuk memperlihatkan seberapa akurat data dari hasil presentase prediksi yang digunakan dalam riset ini. Pengujian ini dapat dilihat dari besar kecilnya nilai presentasi akurasi prediksi (*percently correctly predicte*) pada tabel *expectation-prediction evaluation* dari hasil output perangkat evIEWS 12. Jika hasil mendekati 100% artinya penggunaan model dan variabel semakin akurat dan akurat (Ghozali dan Ratmono, 2017).

### 3.8.3 Analisis Regresi Logistik

#### 1. Uji Regresi Logistik

Penelitian ini menggunakan pengujian kuantitatif. Pengujian hipotesis dilakukandengan analisi multivariat dengan menggunakan analisis regresi logistic. Menurut Alhajjriana, Nor, and Wijaya (2018) analisis regresi logistic yaitu model analisis regresi yang memiliki variable dependen berupa data kategori, sedangkan independennya berupa data numerik. Data kategori berupa nilai dummy 1 atau 0.

Menurut Ghozali dan Ratmono (2017), *logistic regression* yaitu analisis regresi logistik yang menguji apakah probabilitas yang terjadinya antara variabel dependen dapat diprediksi dengan variabel independennya. Regresi logistic tidak perlu uji asumsi normalitas data pada variabel dependennya, serta uji asumsi klasik

lainya seperti uji autokorelasi dan uji heterokedstisitas pada variabel bebasnya.

Adapun Model analisis regresi logistik pada penelitian ini sebagai berikut:

$$PLK = \alpha + \beta_1 AUDIT + \beta_2 FIND + \beta_3 TLRA + \beta_4 KKD + \beta_5 PAD + \beta_6 SIZE + e$$

Artinya:

PLK = Pengungkapan Laporan keuangan Pada Situs Web Pemerintah

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien

Ln = Logaritma Natural

AUDIT = Opini Audit

FIND = Temuan Audit

TLRA = Tindak lanjut Rekomendasi Audit

KKD = Komitmen kepala daerah

PAD = Kekayaan Daerah

Size = Ukuran Pemerintah Daerah

$e$  = Error

## 2. Rasio Kecenderungan (Odds Ratio)

Menginterpretasi analisis regresi logistik dalam eviews tidak bisa secara langsung melainkan harus membandingkan dengan nilai *odds ratio*. *Odds ratio* menunjukkan sebuah probabilitas sesuatu kejadian yang terjadi dibandingkan dengan probabilitas suatu kejadian yang tidak akan terjadi. (Ghozali, 2013). Pada penelitian ini menggunakan variabel dummy yang memberikan kode  $y=1$  pada perusahaan yang menerima opini *going concern* dan  $y = 0$  apabila perusahaan tidak menerima opini *going concern*. Odds rasio dalam penelitian ini mengukur

seberapa dampak kenaikan untuk mempengaruhi variabel dependen apabila terdapat 1 peluang variabel independen.

#### **3.8.4 Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas mempunyai tujuan untuk memperlihatkan di dalam hasil pengujian bahwa tidak terdapat korelasi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Tidak adanya korelasi diantara variabel independen menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan sudah baik (Ghozali, 2013). Uji matrik korelasi antar variabel bebas digunakan dalam melihat uji multikol untuk mengetahui seberapa besar variabel independen berkorelasi.

Pengujian ini menggunakan matrik korelasi dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Tidak terjadi multikolinearitas jika nilai koefisien antar variabel independen  $< 0,9$ .
- b. Terjadi multikolinearitas jika nilai koefisien antar variabel independen  $> 0,9$ . (Sarwono, 2016)

#### **3.8.5 Uji Hipotesis**

##### **1. Uji Parsial**

Uji parsial atau sering disebut uji t dilakukan dalam penelitian ini untuk mengetahui ada tidaknya suatu pengaruh secara parsial dan signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Uji parsial dalam regresi logistic dapat dilihat dari nilai z-statistik uji signifikan dengan penetapan hipotesis nol ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ). Hipotesis pengujian sebagai berikut:



$H_0$ : Variabel terikat (dependen) tidak dipengaruhi oleh variabel bebas (independen)

$H_a$ : Variabel terikat (dependen) dipengaruhi variabel bebas (independen)

Perbandingan nilai probabilitas dengan tingkat signifikansi penelitian dapat digunakan untuk menentukan apakah  $H_0$  dapat diterima atau ditolak. Jika nilai perhitungan (probabilitas) lebih kecil dari tingkat signifikansinya ( $\text{sig} < 0,01; 0,05$  dan  $0,1$ ) maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Sebaliknya jika nilai perhitungan (probabilitas) lebih besar dari tingkat signifikansinya ( $\text{sig} > 0,01; 0,05$  dan  $0,1$ ) maka dapat disimpulkan  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

## 2. Uji Model Fit (Overall Model Fit Test)

Uji *Overall Model Fit Test* merupakan uji untuk mengetahui apakah variabel terikat (dependen) dapat dipengaruhi secara simultan dan menyeluruh oleh variabel bebas (independen). Uji model ini melihat nilai dari LR statistik atau nilai dari perbedaan  $-2LL$  antara model konstanta dan model diestimasi konstanta dengan variabel independen. (Widarjono, 2010). Pengujian pada penelitian ini dapat dilihat dengan membandingkan antara probabilitas (LR statistik) dengan nilai signifikansinya sebesar 5%, dengan hipotesis yang dibentuk sebagai berikut ;

$H_0$ : Variabel bebas (independen) tidak mempengaruhi variabel terikat (dependen).

$H_a$ : Variabel bebas (independen) mempengaruhi variabel terikat (dependen)

Keterangan:

- a. Jika probabilitas LR stat  $> 0,05$  =  $H_0$  diterima &  $H_a$  ditolak
- b. Jika probabilitas LR stat  $< 0,05$  =  $H_a$  diterima &  $H_0$  diterima

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian**

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan dengan variabel independen opini audit, temuan audit, tindak lanjut rekomendasi audit, komitmen kepala daerah, kekayaan pemda, dan ukuran pemda. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan hasil pemeriksaan dari laporan keuangan pemerintah daerah yang dapat diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah.

Objek penelitian ini menggunakan sampel sesuai dengan apa yang sudah direncanakan diawal yaitu seluruh daerah tingkat kabupaten dan kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 35 kabupaten dengan jangka waktu penelitian selama 2018-2021 sehingga menghasilkan 140 data sampel karena proses eliminasi *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan 4 tahun periode pengamatan dari tahun 2018-2021 sehingga penelitian ini menghasilkan jumlah data yang diolah sejumlah  $35 \times 4$  tahun = 140 data sampel penelitian.

#### **4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data**

##### **4.2.1 Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif dalam penelitian ini merupakan suatu deskripsi data yang dapat memberikan sebuah gambaran mengenai data yang digunakan dalam penelitian. Deskripsi data tersebut meliputi nilai mean, maximum, minimum, deviasi standar. Tabel dibawah ini menunjukkan hasil dari olah data statistik

deskriptif terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian menggunakan program Eviews versi 12.

Tabel 4. 1  
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	PLK (Y)	AUDIT (X1)	FIND (X2)	TLRA (X3)	KKD (X4)	PAD (X5)	SIZE (X6)
Mean	0.557143	4.857143	9.185714	0.722906	0.457143	525434.8	29.05114
Median	1.000000	5.000000	9.000000	0.766679	0.000000	388227.0	28.96047
Maximum	1.000000	5.000000	17.00000	1.000000	1.000000	2626357.	31.06407
Minimum	0.000000	3.000000	3.000000	0.085106	0.000000	188356.2	28.36501
Std. Dev.	0.498508	0.516928	3.452839	0.238842	0.499949	421679.2	0.441022
Skewness	-0.230079	-3.328201	0.296033	-0.851046	0.172062	2.851984	1.888146
Kurtosis	1.052936	12.07692	2.332253	2.945872	1.029605	12.03746	8.057668
Jarque-Bera Probability	23.34968 0.000009	739.0730 0.000000	4.645827 0.097988	16.91694 0.000212	23.33845 0.000009	666.2309 0.000000	232.4022 0.000000
Sum	78.00000	680.0000	1286.000	101.2068	64.00000	73560876	4067.160
Sum Sq. Dev.	34.54286	37.14286	1657.171	7.929349	34.74286	2.47E+13	27.03559
Observations	140	140	140	140	140	140	140

Sumber: Olah data Eviews 12, 2023

Tabel 4. 2  
Deskriptif Statistik Variabel Dummy

Variabel	N	Value	%
PLK (Y)	62	0	44.28
	78	1	55.72
KKD	76	0	54.28
	64	1	45.72

Sumber: Olah Data, 2023

Berdasarkan tabel 4.1 pada penelitian ini yang menggunakan regresi logistic binary dengan variabel dummy dapat diketahui dan dijelaskan bahwa data obeservasi penelitian berjumlah 140 data. Berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan bahwa:

## 1. Pengungkapan Laporan Keuangan (Y)

Gambar 4.1 menunjukkan hasil dari statistik deskriptif variabel-variabel pada penelitian. Variabel pengungkapan laporan keuangan (PLK) pada penelitian ini diproksikan dengan variabel dummy. Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa PLK mempunyai nilai minimum 0.000000, menunjukkan pemda yang tidak mengungkapkan laporan keuangan. Nilai minimum ini dimiliki oleh Kabupaten Banyumas pada tahun 2019. Nilai maximum sebesar 1.000000 menunjukkan pemda yang mengungkapkan laporan keuangan yang dimiliki oleh Kabupaten Banyumas tahun 2020.

Selanjutnya, nilai mean pada tabel di atas menunjukkan angka sebesar 0.55714 yang mengartikan sebesar 55,71% pengungkapan laporan keuangan dengan kode 1 lebih sedikit muncul dari 140 data sampel penelitian dan terdapat penyimpangan yang ditunjukkan dengan nilai standar deviasi sebesar 0.498508 atau 49,85%, yang artinya simpangan data pada sampel penelitian cukup kecil.

Tabel 4.2 merupakan statistik deskriptif tambahan untuk variabel yang menggunakan proksi *dummy* variabel. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa variabel pengungkapan laporan keuangan dengan kode 0 sebanyak 62 data sampel atau sebesar 44,28 % dan kode 1 sebanyak 78 data sampel atau sebesar 55,71%

## 2. Opini Audit (X1)

Statistik deskriptif pada tabel 4.1 menunjukkan Variabel opini audit (AUDIT) yang diukur menggunakan skala 1-5. Hasil statistic deskriptif pada variabel opini audit memiliki nilai minimum sebesar 3.000000, di mana nilai

terendah dimiliki oleh Kabupaten Demak pada tahun 2020, dan nilai maksimum sebesar 5.000000 yang dimiliki oleh Kabupaten Banyumas pada tahun 2018.

Selanjutnya, nilai rata rata (mean) berdasarkan tabel di atas, variabel opini audit memiliki nilai rata-rata sebesar 4.857143 dengan nilai standar deviasi sebesar 0.516928 di mana nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata, yang artinya simpangan data yang ada pada sampel dalam penelitian cukup kecil.

### 3. Temuan Audit (X2)

Variabel temuan audit (FIND) pada penelitian ini dikukur menggunakan banyak temuan audit pada tahun penelitian. Berdasarkan tabel di atas, FIND memiliki nilai minimum sebesar 3.000000, di mana nilai minimum dimiliki oleh Kabupaten Wonogiri pada tahun 2019, dan nilai maksimum sebesar 17.000000 yang dimiliki oleh Kabupaten Batang pada tahun 2018.

Selanjutnya, berdasarkan tabel di atas, nilai rata-rata (mean) variabel temuan audit sebesar 9.185714 dengan standar deviasi sebesar 3.452839. Hal ini menunjukkan bahwa standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata, yang artinya simpangan data yang ada pada sampel dalam penelitian cukup kecil.

### 4. Tindak Lanjut Rekomendasi (X3)

Variabel tindak lanjut rekomendasi (TLRA) yang dihitung menggunakan rekomendasi sesuai/ jumlah rekomendasi menghasilkan nilai minimum sebesar 0.085106 oleh daerah Tegal pada tahun 2020 dan nilai maksimum sebesar 1.000000 oleh daerah Banyumas pada tahun 2020.

Selanjutnya, berdasarkan tabel di atas nilai mean atau rata-rata variabel tindak lanjut rekomendasi sebesar 0.722906 dengan nilai standar deviasi sebesar

0.238842. Hal ini berarti standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata, yang artinya simpangan data yang ada pada sampel dalam penelitian cukup kecil.

#### 5. Komitmen Audit (X4)

Variabel komitmen kepala daerah (KKD) yang diukur menggunakan menggunakan biner: 0 untuk “tidak berkomitmen” dan 1 untuk “berkomitmen” memiliki nilai minimum sebesar 0.000000 dan nilai maksimum sebesar 1.000000. Nilai rata-rata (mean) variabel temuan audit sebesar 0.457143 dengan standar deviasi sebesar 0.499949. Hasil pada table 4.2 memperlihatkan bahwa variabel komitmen kepala daerah dengan kode 0 sebanyak 76 data sampel atau sebesar 54,28 % dan kode 1 sebanyak 64 data sampel atau sebesar 55,72%

#### 6. Kekayaan Pemda (X5)

Variabel kekayaan pemda (PAD) yang diukur menggunakan total PAD/ jumlah penduduk memiliki nilai minimum sebesar 188356.2 oleh daerah Brebes pada tahun 2021 dan nilai maksimum sebesar 2626357 oleh daerah kota Magelang pada tahun 2021.

Selanjutnya, berdasarkan tabel di atas, nilai rata-rata (mean) variabel temuan audit sebesar 525434.8 dengan standar deviasi sebesar 421679.2. Hal ini menunjukkan bahwa standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata, yang artinya simpangan data yang ada pada sampel dalam penelitian cukup kecil.

#### 7. Ukuran Pemda (X6)

Variabel ukuran pemda (SIZE) yang diukur menggunakan ln total aset memiliki nilai minimum sebesar 28.36501 yang dimiliki oleh daerah Rembang

pada tahun 2018, dan nilai maksimum sebesar 31.06407 yang dimiliki oleh daerah Kota Semarang pada tahun 2018.

Selanjutnya, berdasarkan tabel di atas, nilai rata-rata (mean) variabel temuan audit sebesar 29.05114 dengan standar deviasi sebesar 0.441022. Hal ini menunjukkan bahwa standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata, yang artinya simpangan data yang ada pada sampel dalam penelitian cukup kecil.

#### 4.2.2 Uji Model Penelitian

##### 1. Uji Koefisien Determinasi (*McFadden R-squared*)

Model regresi logistic yang diolah menggunakan program *Eviews 10* untuk melihat koefisien determinasi dapat dilakukan dengan melihat hasil dari *McFadden R-squared*.

Tabel 4. 3  
Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

McFadden R-squared	0.090001	Mean dependent var	0.557143
S.D. dependent var	0.498508	S.E. of regression	0.479800
Akaike info criterion	1.349614	Sum squared resid	30.61765
			-
Schwarz criterion	1.496696	Log likelihood	87.47299
Hannan-Quinn criter.	1.409384	Deviance	174.9460
			-
Restr. deviance	192.2486	Restr. log likelihood	96.12432
			-
LR statistic	17.30266	Avg. log likelihood	0.624807
Prob(LR statistic)	0.008233		

Sumber: Olah Data Eviews 12, 2023

Nilai perhitungan *McFadden R-Squared* pada tabel 4.3 menghasilkan nilai sebesar 0.090001 atau jika dalam presentasi sebesar 9% yang dapat disimpulkan bahwa perubahan tinggi rendahnya pengungkapan laporan keuangan perusahaan dapat dijelaskan oleh variabel opini audit, temuan audit, tindak lanjut

rekomendasi, komitmen kepala daerah, kekayaan pemda, dan ukuran pemda sebesar 9% sementara sisanya sebesar 91% dijelaskan dan dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang lain.

## 2. Uji Kelayakan Model (*Houser And Lemeshow's Goodnes*)

Uji kelayakan model dengan menggunakan uji *Hosmer and Lemeshow's Goodnes* dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat adanya kesesuaian antara model penelitian dengan data penelitian. Uji ini melihat dari nilai *chi square* dari uji *Hosmer and Lemeshow's Goodnes*.

Tabel 4. 4  
Hasil Uji *Hosmer and Lemeshow's Goodnes*

H-L Statistic	14.1483	Prob. Chi-Sq(8)	0.0780
Andrews Statistic	17.4544	Prob. Chi-Sq(10)	0.0649

Pada perhitungan tabel 4.4 yang merupakan uji *Hosmer and Lemeshow's Goodnes* atau uji kelayakan model menunjukkan probabilitas *Chi Square* menunjukkan angka sebesar 0.0780 yang menandakan bahwa kriteria sudah sesuai dengan kelayakan model yang berarti  $H_0$  diterima. Nilai  $0.0780 > 0,05$  yang dapat diterjemahkan bahwa tidak ada perbedaan pada estimasi data regresi logistik dengan data penelitian, hal tersebut menunjukkan bahwa model regresi dapat dikatakan layak dan sesuai atau model dikatakan *fit*.

## 3. Uji Matriks Klasifikasi

Uji matriks klasifikasi ini untuk mengetahui estimasi nilai presentase hasil prediksi model.



Tabel 4. 5  
Uji *Expectation Prediction*

	Estimated Equation			Constant Probability		
	Dep=0	Dep=1	Total	Dep=0	Dep=1	Total
P(Dep=1)<=C	36	21	57	0	0	0
P(Dep=1)>C	26	57	83	62	78	140
Total	62	78	140	62	78	140
Correct	36	57	93	0	78	78
% Correct	58.06	73.08	66.43	0.00	100.00	55.71
% Incorrect	41.94	26.92	33.57	100.00	0.00	44.29
Total Gain*	58.06	-26.92	10.71			
Percent Gain**	58.06	NA	24.19			

Sumber: Olah Data Eviews 12, 2023

Uji *expectation-model* pada tabel 4.5 pada kolom total estimated equation menunjukkan prediksi akurasi *correct* sebesar 66.43 % yang berarti dalam penelitian ini presentase ketepatan model yang diteliti cukup baik karena mendekati angka 100%.

### 4.2.3 Uji Regresi Logistik

#### 1. Uji Regresi Logistik

Penelitian ini menggunakan model regresi logistik dengan program olah data Eviews 10 yang menghasilkan tabel berikut ini:

Tabel 4. 6  
Hasil Uji Regresi Logistik

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	-28.49896	13.69693	-2.080683	0.0375
AUDIT (X1)	-0.855862	0.433515	-1.974238	0.0484
FIND (X2)	-0.102546	0.057125	-1.795124	0.0726
TLRA (X3)	-0.081406	0.774190	-0.105150	0.9163
KKD (X4)	0.881975	0.385680	2.286807	0.0222
PAD (X5)	-3.91E-07	4.56E-07	-0.857716	0.3910
SIZE (X6)	1.161187	0.475764	2.440679	0.0147

Sumber: Olah Data Eviews 12, 2023

## 2. Rasio Kecenderungan (*Odds Ratio*)

Tabel 4. 7  
*Odds Ratio*

Variabel	Coefficient	Odds Ratio
C	-28.49896	4.19816E-13
AUDIT	-0.855862	0.424916755
FIND	-0.102546	0.902536632
TLRA	-0.081406	0.921819357
KKD	0.881975	2.415665938
PAD	-3.91E-07	0.999999609
SIZE	1.161187	3.193721975

Sumber: Olah Data Excel, 2023

Berdasarkan hasil pengujian regresi logistik tersebut, diperoleh model persamaan regresi logistic sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{PLK} &= \alpha + \beta_1 \text{AUDIT} + \beta_2 \text{FIND} + \beta_3 \text{TLRA} + \beta_4 \text{KKD} + \beta_5 \text{PAD} + \beta_6 \text{SIZE} + e \\
 &= - 28.49896 - 0.855862 \text{ AUDIT} - 0.102546 \text{ FIND} - 0.081406 \text{ TLRA} + \\
 &\quad 0.881975 \text{ KKD} - 3.91\text{E-}07 \text{ PAD} + 1.161187 \text{ SIZE} + \varepsilon
 \end{aligned}$$

Pada persamaan regresi logistik untuk menginterpretasikan hasil output tidak bisa secara langsung yang biasanya diterapkan pada model regresi linear pada umumnya, tetapi dalam model regresi logistic harus diinterpretasikan dengan melihat nilai taksiran *odds ratio* yang dapat dicari dengan rumus  $2,72^{(\text{Coefficient})}$  atau dapat dicari dengan *Exponential Coefficient* masing-masing variabel. Dari hasil uji pada tabel 4.5 dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta ( $\alpha$ ) sebesar -28.49896 menunjukkan bahwa variabel independen (AUDIT, FIND, TLRA, KKD, PAD, dan SIZE) bernilai 0 persen, maka PLK (Pengungkapan Laporan Keuangan) ialah sebesar -28.49896 persen.
2. Variabel opini audit memiliki koefisien regresi sebesar -0.855862 dan antilog dari nilai odds ratio variabel opini audit sebesar 0.424916755 nilai koefisien regresi menunjukkan tanda negatif yang dapat diartikan setiap kenaikan 1 satuan pada variabel opini audit akan menurunkan tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah sebesar 0.424916755.
3. Variabel temuan audit memiliki koefisien regresi sebesar -0.102546 dan antilog dari nilai *odds ratio* variabel kualitas audit sebesar 0.1025462. Koefisien regresi menunjukkan tanda negatif yang dapat diartikan setiap kenaikan 1 satuan pada variabel temuan audit akan menurunkan tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah sebesar 0.1025462.
4. Variabel tindak lanjut rekomendasi audit memiliki koefisien regresi sebesar -0.081406 dan antilog dari nilai *odds ratio* variabel tindak lanjut rekomendasi sebesar 0.921819357 sedangkan nilai koefisien regresi menunjukkan tanda positif yang dapat diartikan bahwa setiap kenaikan 1 satuan pada variabel tindak lanjut rekomendasi akan menaikkan tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah sebesar 0.921819357
5. Variabel komitmen kepala daerah pada tabel memiliki koefisien regresi sebesar 0.881975 dan antilog dari nilai *odds ratio* variabel ukuran perusahaan sebesar 2.415665938. Nilai koefisien regresi menunjukkan tanda

positif yang dapat diartikan bahwa setiap kenaikan 1 satuan pada variable komitmen kepala daerah akan menaikkan tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah sebesar 2.415665938.

6. Variabel kekayaan pemda memiliki koefisien regresi sebesar  $-3.91E-07$  dan antilog dari nilai odds ratio variabel kekayaan pemda sebesar 0.999999609 dan nilai koefisien regresi menunjukkan tanda negatif yang dapat diartikan setiap kenaikan 1 satuan pada variable kekayaan pemda akan menurunkan tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah sebesar 0.999999609.
7. Variabel ukuran pemda memiliki koefisien regresi sebesar 1.161187 dan antilog dari nilai *odds ratio* variabel ukuran pemda sebesar 3.193721975. Nilai koefisien regresi menunjukkan tanda positif yang dapat diartikan setiap kenaikan 1 satuan pada variable ukuran pemda akan menaikkan tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah sebesar 3.193721975.

#### **4.2.4 Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas menunjukkan ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas yaitu opini audit, temuan audit, tindak lanjut rekomendasi audit, komitmen kepala daerah, kekayaan pemda, dan ukuran pemda. Hasil pengujian multikol dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 8  
Hasil Uji Multikolinieritas

	PLK (Y)	AUDIT (X1)	FIND (X2)	TLRA (X3)	KKD (X4)	PAD (X5)	SIZE (X6)
PLK (Y)	1.000000	-0.135601	-0.077263	-0.020853	0.183094	0.015318	0.199765
AUDIT (X1)	-0.135601	1.000000	-0.073704	-0.060277	0.031814	-0.005810	0.090364
FIND (X2)	-0.077263	-0.073704	1.000000	0.091635	0.188017	0.007938	0.124172
TLRA (X3)	-0.020853	-0.060277	0.091635	1.000000	-0.004315	-0.170108	-0.091608
KKD (X4)	0.183094	0.031814	0.188017	-0.004315	1.000000	0.196853	0.151970
PAD (X5)	0.015318	-0.005810	0.007938	-0.170108	0.196853	1.000000	0.222688
SIZE (X6)	0.199765	0.090364	0.124172	-0.091608	0.151970	0.222688	1.000000

Sumber: Olah Data, 2023

Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat diketahui bahwa tidak terdapat korelasi yang ditunjukkan dari nilai koefisien masing-masing variabel yang angkanya lebih dari 0.9. Sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinieritas.

#### 4.2.5 Uji Hipotesis

##### 1. Uji Parsial

Uji parsial yang seringkali disebut dengan uji t berfungsi untuk melihat adanya pengaruh variabel bebas (independen) yaitu opini audit, temuan audit, tindak lanjut rekomendasi audit, komitmen kepala daerah, kekayaan pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah terhadap variabel terikat (dependen) yaitu pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah secara parsial. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 9  
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	-28.49896	13.69693	-2.080683	0.0375
AUDIT (X1)	-0.855862	0.433515	-1.974238	0.0484
FIND (X2)	-0.102546	0.057125	-1.795124	0.0726
TLRA (X3)	-0.081406	0.774190	-0.105150	0.9163
KKD (X4)	0.881975	0.385680	2.286807	0.0222
PAD (X5)	-3.91E-07	4.56E-07	-0.857716	0.3910
SIZE (X6)	1.161187	0.475764	2.440679	0.0147

Sumber: Olah Data Eview 12, 2023

a. Variabel Opini Audit

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan nilai z-statistik dengan angka -1.974238 pada variabel opini audit dan nilai probabilitas sebesar 0.0484 ( $p < 0,05$  atau  $p < 0,1$ ) yang berarti variabel independen opini audit mempunyai pengaruh negatif terhadap variabel dependen opini pengungkapan laporan keuangan. Dengan penjelasan tersebut maka  $H_1$  ditolak.

b. Variabel Temuan Audit

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan nilai z-statistik dengan angka -1.795124 pada variabel temuan audit dan nilai probabilitas sebesar 0.0726 ( $p > 0,05$  atau  $p < 0,1$ ) yang berarti variabel independen temuan audit memiliki pengaruh negatif terhadap variabel dependen pengungkapan laporan keuangan. Dengan penjelasan tersebut maka  $H_2$  diterima.

c. Variabel Tindak Lanjut Rekomendasi

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan nilai z-statistik dengan angka -0.105150 pada variabel Tindak Lanjut Rekomendasi dan nilai probabilitas sebesar 0.9163 ( $p > 0,05$  atau  $p > 0,1$ ) yang berarti variabel independen Tindak Lanjut

Rekomendasi tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen pengungkapan laporan keuangan. Dengan penjelasan tersebut maka  $H_3$  ditolak

d. Variabel Komitmen Kepala Daerah

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan nilai z-statistik dengan angka 2.286807 pada variabel Komitmen Kepala Daerah dan nilai probabilitas sebesar 0.0222 ( $p < 0,05$  atau  $p < 0,1$ ) yang berarti variabel independen Komitmen Kepala Daerah menunjukkan pengaruh secara positif terhadap variabel dependen pengungkapan laporan keuangan. Dengan penjelasan tersebut maka  $H_4$  diterima.

e. Variabel Kekayaan Pemda

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan nilai z-statistik dengan angka -0.857716 pada variabel Kekayaan Pemda dan nilai probabilitas sebesar 0.3910 ( $p > 0,05$  atau  $p > 0,1$ ) yang berarti variabel independen Kekayaan Pemda tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen pengungkapan laporan keuangan. Dengan penjelasan tersebut maka  $H_5$  ditolak.

f. Variabel Ukuran Pemda

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan nilai z-statistik dengan angka 2.440679 pada variabel Ukuran Pemda dan nilai probabilitas sebesar 0.0147 ( $p < 0,05$  atau  $p < 0,1$ ) yang berarti variabel independen Ukuran Pemda menunjukkan pengaruh secara positif terhadap variabel dependen pengungkapan laporan keuangan. Dengan penjelasan tersebut maka  $H_6$  diterima.

### 3. Uji Model Fit (Overall Model Fit Test) / Uji Simultan

Tabel 4. 10  
Uji *Overall Model Fit*

McFadden R-squared	0.090001	Mean dependent var	0.557143
S.D. dependent var	0.498508	S.E. of regression	0.479800
Akaike info criterion	1.349614	Sum squared resid	30.61765
Schwarz criterion	1.496696	Log likelihood	-87.47299
Hannan-Quinn criter.	1.409384	Deviance	174.9460
Restr. deviance	192.2486	Restr. log likelihood	-96.12432
LR statistic	17.30266	Avg. log likelihood	-0.624807
Prob(LR statistic)	0.008233		

Sumber: Olah Data Eview 12, 2023

Pada uji *Overall Model Fit Test* tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai probabilitas (LR statistic) sebesar  $0.008233 < 0.05$ . sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang berarti terdapat pengaruh secara simultan antara variabel independen opini audit, temuan audit, tindak lanjut rekomendasi, komitmen kepala daerah, kekayaan pemda, dan ukuran pemda terhadap variabel dependen pengungkapan laporan keuangan serta tidak ada perbedaan antara model penelitian dengan data penelitian.

## 4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data

### 4.3.1 Pengaruh Opini Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan

Hasil penelitian ini membuktikan dan menunjukkan bahwasannya opini audit memberikan pengaruh terhadap pemberian Pengungkapan Laporan Keuangan. Ditunjukkan dengan nilai probabilitas pada variabel opini audit lebih kecil dari tingkat signifikannya dengan angka  $0.0484 < 0,05$  dan memberikan suatu penjelasan bahwa variabel opini audit memberikan pengaruh secara negatif



terhadap pengungkapan laporan keuangan sehingga  $H_1$  ditolak dikarenakan bersebrangan arah. Hasil koefisien regresi menunjukkan nilai sebesar -0.855862 dan nilai antilog *odds ratio* sebesar 0.424916755 sehingga dapat dijelaskan bahwa terdapat penurunan peluang sebesar 0.424916755 kali pada setiap 1 opini audit dalam pengungkapan laporan keuangan.

Hasil penelitian ini dapat dilihat pada Kabupaten Demak, di mana pada tahun 2020 Kabupaten Demak mendapatkan opini audit wajar dengan pengecualian dan tetap mengungkapkan laporan keuangan pada tahun tersebut. Sedangkan, pada tahun 2021 Kabupaten Demak mendapatkan opini audit wajar tanpa pengecualian namun tidak mengungkapkan laporan keuangan pada tahun tersebut.

Opini audit merupakan sebuah penjelasan dari kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena segala informasi mengenai tata kelola dari segala aspek tersajikan dalam laporan tersebut. Opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP) mencerminkan bahwa kualitas dari laporan keuangan yang disajikan sudah memenuhi standar pelaporan yang sudah ditetapkan dan dapat diandalkan. (Budiarto & Indarti, 2019)

Berdasarkan data penelitian sebanyak 35 sampel kabupaten dan kota se-Jawa Tengah terdapat 30 kabupaten dan kota yang selama periode penelitian 2018-2021 konsisten mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian antara lain: kota Surakarta, Kota Semarang, Kab. Semarang, Kab. Boyolali dan 26 kabupaten dan kota yang lain. Berdasarkan data sampel menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh secara negatif terhadap pengungkapan laporan keuangan. Hal tersebut terjadi karena sebagian besar pemda dan hampir seluruh pemda memiliki opini audit WTP tetapi sebagian pemda tidak mengungkapkan laporan keuangan pemerintah daerahnya di website dan bahkan tidak memiliki akses website yang cukup memadai. Beberapa pemda justru mengedepankan promosi wilayah pariwisata dan potensi investasi daripada pengungkapan dan transparansi laporan keuangan daerah. (Hardianto & Murtin, 2020)

#### **4.3.2 Pengaruh Temuan Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan**

Penelitian ini secara empiris dapat membuktikan bahwa variabel temuan audit tidak memberikan pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan. Temuan audit memiliki nilai probabilitas yang lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikannya  $0.0726 < 0,010$  dan nilai koefisien regresi sebesar  $-0.102546$  sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel temuan audit memberikan pengaruh secara negative terhadap pengungkapan laporan keuangan pada tingkat signifikansi 10% sehingga  $H_2$  dalam penelitian ini diterima. Nilai *odds ratio* temuan audit sebesar  $0.102546$  yang dapat diartikan bahwa terjadi penurunan pada temuan audit sebesar  $0.1025462$  kali setiap 1 satuan terhadap pengungkapan laporan keuangan.

Berdasarkan data penelitian terdapat 35 sampel kabupaten/kota yang mendapatkan hasil temuan audit tertinggi adalah Kab. Batang tahun 2018, Kab. Klaten tahun 2018, Kab. Pati tahun 2020, dan Kota Semarang tahun 2021

sebanyak 17 temuan audit. Dari data penelitian menunjukkan bahwa kabupaten/kota yang mendapatkan temuan audit yang tinggi juga bersedia untuk mengungkapkan laporan keuangan pemerintah daerahnya.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Rahayu & Mardiana (2016), yang menunjukkan bahwa nilai temuan audit memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan. Hiola dan Harun, (2021) juga menyatakan bahwa temuan audit berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pada situs web pemerintah daerah. Sejalan dengan Penelitian Imtinan dan Hasibuan, (2021) yang menyatakan bahwa variabel temuan audit berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar temuan audit akan memperkecil presentase kemungkinan pemerintah daerah mengungkapkan laporan keuangan daerah dan semakin kecil atau sedikit sebuah temuan audit maka akan memperbesar kemungkinan pemerintah daerah untuk mengungkapkan laporan keuangannya. Tingkat temuan audit yang kecil membuat pemerintah daerah merasa yakin dan percaya diri bahwa tata kelola pemerintahan yang dijalankan sudah berjalan dengan baik sehingga tidak ada kendala jika laporan keuangan pemerintah daerahnya dipublikasi. (Khasanah dan Rahardjo, 2014)

#### **4.3.3 Pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan**

Penelitian ini secara empiris dapat membuktikan bahwa variabel tindak lanjut rekomendasi tidak memberikan pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan. Tindak lanjut rekomendasi memiliki nilai probabilitas yang lebih besar

dibandingkan dengan tingkat signifikannya, yaitu 0.9163 ( $p > 0,05$  atau  $p > 0,1$ ) dan nilai koefisien regresi sebesar -0.081406 sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel tindak lanjut rekomendasi tidak memberikan pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan sehingga  $H_3$  dalam penelitian ini ditolak. Nilai antilog odds ratio pada variabel tindak lanjut rekomendasi sebesar 0.902536632 yang dapat diartikan bahwa terjadi penurunan sebesar 0.902536632 kali setiap kenaikan 1 satuan pada kualitas audit terhadap pengungkapan laporan keuangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rekomendasi tindak lanjut audit yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan laporan keuangan pada website pemerintah daerah.

Setyaningrum (2015) menyatakan bahwa tindak lanjut periode hasil pemeriksaan diukur dengan banyaknya rekomendasi yang diberikan oleh pemerintah sehingga kualitas laporan keuangan yang direpresentasikan pada tingkat pengungkapan menjadi semakin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk segera memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Respon atas perbaikan tersebut merupakan wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi keuangan kepada masyarakat.

Menurut Gilardi (2001), hubungan keagenan merupakan pendelegasian rantai delegasi, pendelegasian rakyat kepada wakilnya di DPR, dari DPR kepada pemerintah. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan apa yang dikelolanya kepada publik. Hal ini karena pendapatan daerah juga diperoleh dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat.

Pengungkapan laporan keuangan pada website pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan pihak eksternal khususnya masyarakat terhadap pemerintah. Pengungkapan laporan keuangan pada website pemda memberikan kemudahan bagi pihak eksternal untuk mengetahui komitmen pemda untuk memperbaiki kesalahan dalam penyusunan laporan keuangannya.

Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wahyudi Nor, dkk (2019) bahwa variabel tindak lanjut rekomendasi tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan. Rekomendasi tindak lanjut audit yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan laporan keuangan.

#### **4.3.4 Pengaruh Komitmen Kepala Daerah Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan**

Penelitian ini secara empiris dapat membuktikan bahwa variabel komitmen kepala daerah memberikan pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan. Nilai koefisien regresi sebesar 0.881975 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0222 sehingga jika dibandingkan dengan nilai signifikansi 0.0222 ( $p < 0,05$  atau  $p < 0,1$ ) dapat disimpulkan bahwa variabel komitmen kepala daerah dalam penelitian ini memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan sehingga  $H_4$  diterima. Nilai antilog *odds ratio* pada variabel komitmen kepala daerah sebesar 2.415665938 yang dapat diartikan bahwa terdapat peningkatan sebesar 2.415665938 kali setiap kenaikan 1 satuan pada komitmen kepala daerah terhadap pengungkapan laporan keuangan.

Komitmen dari kepala daerah sangat berperan penting dalam menunjang suatu keberhasilan dari tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Mempertahankan sebuah komitmen dalam hal menciptakan sebuah transparansi pelaporan keuangan menjadi suatu tantangan tersendiri. Komitmen yang tinggi akan menghadirkan loyalitas dan keterlibatan kinerja yang baik dalam mencapai sebuah tujuan organisasi sehingga standar pelaporan yang dihasilkan akan berjalan sebagaimana mestinya. (Davici, 2018)

Pejabat publik dituntut untuk lebih transparan, akuntabel dan lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat. Artinya, penting bagi kepala daerah untuk berkomitmen mengungkapkan laporan keuangan di internet sebagai bentuk pertanggungjawaban sumber pendanaan yang dikelola.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Davici (2018) yang dalam penelitiannya menunjukkan bahwa variabel komitmen kepala daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan. Data penelitian menunjukkan bahwa kepala daerah yang mempunyai komitmen membangun tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel akan memberikan efek positif dalam kualitas laporan keuangan yang dihasilkan sehingga pemerintah daerah tidak ragu dalam hal pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pelaporan keuangan melalui internet yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat membangun kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya kepada pemerintah. Hal ini merupakan wujud nyata penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah khususnya dalam pengelolaan APBD yang telah sesuai dengan aturan yang berlaku. (Nor et al., 2019)

Selain itu, dapat mendukung upaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel. Sehingga dengan adanya pelaporan keuangan di internet yang didukung oleh komitmen yang kuat dari kepala daerah dalam melakukan transparansi akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. (Nor et al., 2019)

#### **4.3.5 Pengaruh Kekayaan Pemda Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan**

Hasil penelitian secara empiris dapat membuktikan bahwa variabel kekayaan pemda tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0.3910 yang berarti lebih besar dari nilai signifikannya 0.3910 ( $p > 0,05$  atau  $p > 0,1$ ) dan nilai koefisien regresi dari variabel kekayaan pemda sebesar  $-3.91E-07$  dengan data tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel kekayaan pemda tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan sehingga  $H_5$  ditolak. Nilai antilog dari *odds ratio* variabel kekayaan pemda sebesar 0.999999609 yang berarti terdapat penurunan sebesar 0.999999609 setiap peningkatan 1 satuan pada kekayaan pemda terhadap pengungkapan laporan keuangan.

Kekayaan daerah dapat diukur dengan besaran PAD. Jika jumlah pendapatan per kapita semakin tinggi, otomatis tidak akan mempengaruhi ketersediaan informasi keuangan karena pemerintah daerah merasa percaya diri akan laporan keuangan yang akan disajikan. Besarnya kekayaan pemerintah daerah secara tidak langsung akan berdampak pada masyarakat, dimana

masyarakat membutuhkan informasi keuangan yang diungkapkan oleh pemerintah daerah dalam e-government.

Berbeda dengan penjelasan tersebut justru hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekayaan pemerintah daerah tidak mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hapsari et al., (2020) menyatakan bahwa kekayaan pemerintah daerah tidak mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

Data penelitian menunjukkan bahwa kekayaan pemerintah daerah yang besar belum bisa dijadikan sebagai acuan untuk membuktikan pemerintah daerah akan bertindak transparan dengan mengungkapkan laporan keuangannya. Hal tersebut diduga disebabkan pengelolaan kekayaan daerah yang dimiliki pemda belum dikelola secara efisien sehingga pemda belum mampu untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan kepada masyarakat dan didukung dengan kualitas pelayanan yang baik. (Putri & Setiawan, 2022)

#### **4.3.6 Pengaruh Ukuran Pemda Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan**

Hasil penelitian secara empiris dapat membuktikan bahwa variabel ukuran pemda mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas sebesar 0.0147 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikannya 0.0147 ( $p < 0,05$  atau  $p < 0,1$ ) dan nilai koefisien regresi dari variabel likuiditas sebesar 1.161187 dengan data tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel likuiditas mempengaruhi penerimaan pengungkapan laporan keuangan secara positif sehingga  $H_0$  diterima. Nilai antilog dari odds ratio variabel



ukuran pemda sebesar 3.193721975 yang berarti setiap peningkatan 1 satuan pada ukuran pemda memberikan pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Maulana (2015) yang menyatakan bahwa ukuran pemda berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Semakin besar ukuran pemerintah daerah maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini disebabkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki aset yang besar memiliki tekanan yang besar untuk melaporkan laporannya (Yulinda, 2016)

Penelitian dari Putri & Arza (2015) juga mengungkapkan hubungan antara ukuran pemerintah daerah dengan pengungkapan LKPD yang memperoleh hasil bahwa ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengungkapan LKPD. Terdapat banyak bukti yang mendukung ide bahwa ukuran sebuah organisasi secara signifikan mempengaruhi struktur organisasi. Organisasi-organisasi besar lebih cenderung memiliki banyak aturan dan ketentuan daripada organisasi kecil. Provinsi, Kota dan Kabupaten dengan total aset yang lebih besar akan lebih kompleks dalam menjaga dan mengelola asetnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Menurut analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini maka kesimpulan yang dapat ditarik:

1. Variabel opini audit mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan secara negatif. Penelitian ini justru menunjukkan bahwa ketika laporan keuangan daerah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, maka daerah tersebut cenderung tidak mengungkapkan laporan keuangan.
2. Temuan audit mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan secara negatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin banyak temuan audit pada laporan keuangan akan semakin besar kemungkinan bahwa daerah tersebut tidak mengungkapkan laporan keuangan.
3. Tindak lanjut rekomendasi audit tidak mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa rekomendasi tindak lanjut audit yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan laporan keuangan pada website pemerintah daerah.
4. Komitmen kepala daerah mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan secara positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingginya komitmen kepala daerah akan menghadirkan loyalitas dan keterlibatan kinerja yang baik dalam mencapai tujuan pemerintahan, sehingga standar pelaporan yang dihasilkan akan semakin baik.

5. Kekayaan pemda tidak mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan daerah akan tetap diungkapkan oleh pemda dengan kekayaan yang tinggi maupun rendah.
6. Ukuran pemda memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan secara positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar suatu pemerintahan daerah, maka semakin besar pula kecenderungan pemerintah daerah untuk mengungkapkan laporan keuangannya.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

1. Penelitian ini hanya terbatas pada ruang lingkup pemerintah se-Jawa Tengah sehingga belum mampu untuk menggeneralisasi penelitian secara luas.
2. Terbatasnya publikasi laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota sehingga peneliti harus mengupayakan data yang lebih lengkap dari Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Tengah.

## **5.3 Saran Penelitian**

Setelah melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan, peneliti dapat menyarankan beberapa hal terkait penelitian:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah variabel lain sebagai faktor yang mempengaruhi pelaporan keuangan daerah karena pada penelitian ini memiliki koefisien determinasi yang tidak terlalu besar. Variabel tersebut seperti: temuan audit, tindak lanjut rekomendasi audit, dan ukuran pemda.

## 2. Bagi Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong setiap daerah untuk mengungkapkan laporan keuangan pada web pemerintah daerah secara baik dan transparan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adha, W., Rahmawati, V., & Azhar, A. (2014). Pengaruh Akuntabilitas, Ketidakpastian Lingkungan, Dan Komitmen Pimpinan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada Skpd Kota Dumai). *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 1(2), 40–51.
- Andriani, M., Santi, E., & Mustika, R. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014-2016. *Akuntansi Dan Manajemen*, 14(1), 1–14. <https://doi.org/10.30630/jam.v14i1.81>
- Budiarto, D. S., & Indarti, L. (2019). Apakah Karakteristik Pemerintah Daerah Berpengaruh Pada Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah? Riset Pada Kabupaten Di Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 12(1). <https://doi.org/10.30813/jab.v12i1.1549>
- Carlos, S.-C., Rueda-Tomás, M., & Portillo-Tarragona, P. (2008). *Factors Influencing E-Disclosure In Local Public Administrations*.
- Davici, N. (2018). Pengaruh Tekanan Eksternal, Komitmen Pimpinan Dan Faktor Politik Terhadap Transparansi Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Agam). *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 1–20.
- Dewi, V. I., & Adi, P. H. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Jumlah Penduduk, dan Opini Audit Terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah. *International Journal of Social Science and Business*, 3(4), 358. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i4.21322>
- Hadianto, D., & Murtin, A. (2020). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Internet Financial Reporting ( IFR ) di Indonesia*. 4(2), 33–45.
- Hadis, M. (2018). Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda Terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan Dalam Website Pemda. *Ejournal UNP*.
- Hapsari, D. W., Juniantika, D. A., Manurung, D. T. H., & Rizal, N. (2020). Implementation of Regional Financial Statements using Internet Financial Reporting. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(06), 12174–12179.
- Hiola, Y., & Harun, E. (2021). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Gorontalo. *JSAP : Journal Syariah and Accounting Public*, 4(2), 89. <https://doi.org/10.31314/jsap.4.2.89-101.2021>
- Imtinan, G., & Hasibuan, D. H. (2021). Pengaruh Temuan Audit Dan Tindak

Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Kementerian. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 215–224. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.488>

Jensen, M. C. (1976). dan Meckling, WH. 1976. Theory of The Firm: Manajerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure. In *Jurnal of Financial Economics. Academy Management Review* (Vol. 20, Issue 2, pp. 404–437).

K. Styles, M. T. (2007). *Article information* :

Khasanah, N. L., & Rahardjo, S. N. (2014). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 864–874.

Masdiantini, P. R., & Erawati, N. made A. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan Dan Opini Audit Bpk Pada Kinerja Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(2), 1150–1182.

Murni, A., Rahayu, S., & Zultilisna, D. (2017). Opini Audit, Tingkat Kemandirian, Dan Tipe Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(2), 94–103. <https://doi.org/10.23969/jrak.v9i2.584>

Naopal, F., Siska, S. R., & Yudowati, P. (2017). *PENGARUH KARAKTERISTIK DAERAH, JUMLAH PENDUDUK, .*

Nor, W., Hudaya, M., & Novriyandana, R. (2019). Financial statements disclosure on Indonesian local government websites: A quest of its determinant(s). *Asian Journal of Accounting Research*, 4(1), 112–128. <https://doi.org/10.1108/AJAR-06-2019-0043>

Nosihana, A., & Yaya, R. (2016). Internet Financial Reporting dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2), 89–104. <https://doi.org/10.24815/jdab.v3i2.5389>

Nurani, V. E. (2018). Jurnal Ekobis Dewantara Vol. 1 No.1 Januari 2018. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(3), 23–32.

Nurhidayati, R. P., & Rahayu, S. (2020). Determinant Disclosure of LKPD in the Official Website of The Provincial. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 3(2), 87–95.

Qowi, R., Jatmiko, T., & Prabowo, W. (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Pemeriksaan BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2012. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(1), 1–13.

Rahayu, A., & Mardiana, A. (2016). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan

- Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating Pada LKPD Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 1(1), 169–192.
- Rahman, A., Sutaryo, & Budiarmanto, A. (2013). *Determinan Internet Financial Local Government Reporting di Indonesia. September 2013*, 25–28.
- Senge, P. (1990). *The Art And Practice Of The Learning Organization*.
- Trisnawati, M. D., & Achmad, K. (2014). Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*.
- Utami, & Sulardi. (2019). SHAFIRA RAMADHIA UTAMI (shafirarutami@gmail.com) SULARDI. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 19(2), 253–263.
- Warsidi, Rizkiyaningsih, W., Rusmana, O., & . S. (2017). Determinants of Internet Financial Reporting in Indonesian Local Governments. *SAR (Soedirman Accounting Review) : Journal of Accounting and Business*, 2(1), 101. <https://doi.org/10.20884/1.sar.2017.2.1.409>
- Wilopo, I. A. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas &Transparansi Informasi Keuangan Daerah Melalui Website. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 7(1), 61. [https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7\(1\).61-78](https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(1).61-78)
- Yulia, Y. (2018). *Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Kompleksitas Pemerintahan, dan Tingkat Kesejahteraan Daerah Terhadap Tingkat pengungkapan sukarela informasi keuangan padawebsite pemerintah daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi Se – Indonesia)*. 11(1), 28–44.

**Lampiran 1: Data Sampe Penelitian Situs Resmi Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2021**

No	Kabupaten/ Kota
1	Banyumas
2	Batang
3	Blora
4	Boyolali
5	Brebes
6	Cilacap
7	Demak
8	Grobogan
9	Jepara
10	Karanganyar
11	Kebumen
12	Kendal
13	Klaten
14	Kudus
15	Magelang



16	Pati
17	Pekalongan
18	Pemalang
19	Purbalingga
20	Purworejo
21	Rembang
22	Kab Semarang
23	Sragen
24	Sukoharjo
25	Tegal
26	Temanggung
27	Wonogiri
28	Wonosobo
29	Banjarnegara
30	Kota Magelang
31	Pekalongan
32	Salatiga

33	Kota Semarang
34	Surakarta
35	Tegal

**Lampiran 2: Tabulasi Variabel Pengungkapan Laporan Keuangan**

No	Kabupaten/ Kota	2018	2019	2020	2021
1	Banyumas	1	0	1	1
2	Batang	0	0	0	0
3	Blora	1	1	1	1
4	Boyolali	0	0	0	0
5	Brebes	0	0	1	1
6	Cilacap	0	0	0	1
7	Demak	1	1	1	0
8	Grobogan	0	0	0	0
9	Jepara	0	0	0	0
10	Karanganyar	1	0	1	0
11	Kebumen	0	1	1	1
12	Kendal	1	1	0	0
13	Klaten	1	1	1	1
14	Kudus	1	1	1	1
15	Magelang	1	1	0	0
16	Pati	0	1	0	1

17	Pekalongan	0	0	0	0
18	Pemalang	1	0	0	0
19	Purbalingga	1	1	0	0
20	Purworejo	0	1	1	1
21	Rembang	0	1	1	1
22	Kab Semarang	1	1	1	1
23	Sragen	1	0	1	0
24	Sukoharjo	0	1	1	1
25	Tegal	1	1	1	1
26	Temanggung	0	0	0	0
27	Wonogiri	0	1	1	0
28	Wonosobo	1	1	1	1
29	Banjarnegara	0	1	1	1
30	Kota Magelang	1	1	0	0
31	Pekalongan	1	1	1	0
32	Salatiga	0	0	0	0
33	Kota Semarang	1	1	1	1

34	Surakarta	1	1	1	1
35	Tegal	1	0	1	0

**Lampiran 3: Tabulasi Variabel Opini Audit**

No	Kabupaten/ Kota	2018	2019	2020	2021
1	Banyumas	5	5	5	5
2	Batang	5	5	5	5
3	Blora	3	5	5	5
4	Boyolali	5	5	5	5
5	Brebes	3	5	5	5
6	Cilacap	5	5	5	5
7	Demak	5	5	3	5
8	Grobogan	5	5	5	5
9	Jepara	5	5	5	5
10	Karanganyar	5	5	5	5
11	Kebumen	5	5	5	5
12	Kendal	3	5	5	5
13	Klaten	5	5	5	3
14	Kudus	5	5	5	3
15	Magelang	5	5	5	5
16	Pati	5	5	5	5
17	Pekalongan	5	5	5	5
18	Pemalang	5	5	5	5
19	Purbalingga	3	5	5	5
20	Purworejo	5	5	5	5

21	Rembang	5	5	5	5
22	Kab Semarang	5	5	5	5
23	Sragen	5	5	5	5
24	Sukoharjo	5	5	5	5
25	Tegal	3	5	5	5
26	Temanggung	5	5	5	5
27	Wonogiri	5	5	5	5
28	Wonosobo	5	5	3	5
29	Banjarnegara	5	5	5	5
30	Kota Magelang	5	5	3	5
31	Pekalongan	5	5	5	5
32	Salatiga	5	5	5	5
33	Kota Semarang	5	5	5	5
34	Surakarta	5	5	5	5
35	Tegal	5	5	5	5

**Lampiran 4: Tabulasi Variabel Temuan Audit**

No	Kabupaten/ Kota	2018	2019	2020	2021
1	Banyumas	14	9	12	10
2	Batang	17	5	13	7
3	Blora	16	14	10	5
4	Boyolali	11	6	8	5
5	Brebes	16	7	9	11
6	Cilacap	13	8	14	8
7	Demak	9	6	4	3
8	Grobogan	9	11	6	9
9	Jepara	9	13	9	4
10	Karanganyar	7	8	9	6
11	Kebumen	13	7	12	9
12	Kendal	7	7	11	6
13	Klaten	17	6	11	4
14	Kudus	11	8	13	6
15	Magelang	12	5	11	8
16	Pati	12	5	17	5
17	Pekalongan	12	11	5	6
18	Pemalang	13	4	9	6
19	Purbalingga	14	7	12	7
20	Purworejo	9	7	5	10



21	Rembang	13	10	7	5
22	Kab Semarang	4	9	8	6
23	Sragen	13	11	10	7
24	Sukoharjo	8	7	12	11
25	Tegal	12	10	6	10
26	Temanggung	10	10	11	11
27	Wonogiri	16	3	5	5
28	Wonosobo	13	12	10	13
29	Banjarnegara	14	6	4	9
30	Kota Magelang	8	3	12	10
31	Pekalongan	9	8	4	12
32	Salatiga	14	5	13	9
33	Kota Semarang	14	12	16	17
34	Surakarta	12	7	6	7
35	Tegal	8	5	7	7

**Lampiran 5: Tabulasi Variabel Tindak Lanjut Rekomendasi Audit**

No	Kabupaten/ Kota	2018	2019	2020	2021
1	Banyumas	0.836735	0.458333	1	0.210526
2	Batang	0.852941	0.9	0.857143	0.5
3	Blora	1	1	0.833333	0.761905
4	Boyolali	1	1	0.971429	0.428571
5	Brebes	0.933333	0.9	0.705882	0.586207
6	Cilacap	0.786885	0.869565	0.586207	0.5
7	Demak	0.826087	0.870968	0.9	1
8	Grobogan	0.816667	0.944444	1	0.25
9	Jepara	0.613333	0.129032	0.481481	0.47619
10	Karanganyar	0.9375	0.935484	0.566667	0.695652
11	Kebumen	0.67	0.842105	0.882353	0.4
12	Kendal	0.72093	0.636364	0.757576	0.666667
13	Klaten	0.666667	0.660377	0.931818	0.777778
14	Kudus	0.755556	0.411765	0.75	0.518519
15	Magelang	0.728261	0.520833	0.545455	0.282609
16	Pati	0.988095	1	1	0.934783
17	Pekalongan	0.984127	0.52381	0.642857	0.777778
18	Pemalang	0.833333	0.711111	1	0.115385
19	Purbalingga	0.815217	0.757576	0.571429	0.153846
20	Purworejo	0.788462	0.7	0.416667	0.8

21	Rembang	0.766234	0.647059	0.692308	0.470588
22	Kab Semarang	0.863636	1	0.611111	0.333333
23	Sragen	0.967213	0.975	0.952381	0.112676
24	Sukoharjo	0.863636	0.944444	0.418605	0.40678
25	Tegal	0.802632	1	0.851064	0.295455
26	Temanggung	0.967213	0.955556	0.958333	0.612903
27	Wonogiri	1	1	1	1
28	Wonosobo	0.833333	0.75	0.621622	0.705882
29	Banjarnegara	0.888889	0.885714	0.833333	0.75
30	Kota Magelang	0.833333	0.666667	0.65625	0.296296
31	Pekalongan	0.767123	0.823529	0.23913	0.666667
32	Salatiga	0.951807	0.888889	0.933333	0.724138
33	Kota Semarang	0.747748	0.828571	0.402985	0.197802
34	Surakarta	0.905263	1	0.424242	1
35	Tegal	0.486842	0.697368	0.085106	0.684211

**Lampiran 6: Tabulasi Variabel Komitmen Kepala Daerah**

No	Kabupaten/ Kota	2018	2019	2020	2021
1	Banyumas	1	1	1	1
2	Batang	0	0	0	0
3	Blora	0	0	0	0
4	Boyolali	0	0	0	0
5	Brebes	1	1	1	1
6	Cilacap	0	0	0	0
7	Demak	0	0	0	0
8	Grobogan	0	0	0	0
9	Jepara	0	0	0	0
10	Karanganyar	0	0	0	0
11	Kebumen	1	1	1	0
12	Kendal	0	0	0	0
13	Klaten	1	1	1	1
14	Kudus	1	1	1	0
15	Magelang	0	1	0	0
16	Pati	1	1	1	1
17	Pekalongan	1	1	1	1
18	Pemalang	1	1	0	0
19	Purbalingga	0	0	0	0
20	Purworejo	1	1	1	1

21	Rembang	1	1	1	0
22	Kab Semarang	1	1	1	1
23	Sragen	1	1	1	1
24	Sukoharjo	1	1	1	1
25	Tegal	0	0	0	0
26	Temanggung	0	0	0	0
27	Wonogiri	0	0	0	0
28	Wonosobo	1	1	1	1
29	Banjarnegara	0	0	0	0
30	Kota Magelang	1	1	1	1
31	Pekalongan	0	0	0	0
32	Salatiga	1	1	1	1
33	Kota Semarang	1	1	1	1
34	Surakarta	0	0	0	0
35	Tegal	0	0	0	0

**Lampiran 7: Tabulasi Variabel Kekayaan Pemda**

No	Kabupaten/ Kota	2018	2019	2020	2021
1	Banyumas	402,292.78	418,376.18	383,507.09	460,014.55
2	Batang	330,350.38	350,720.07	337,775.46	388,095.86
3	Blora	287,172.12	378,857.46	311,186.23	400,793.36
4	Boyolali	393,439.98	388,358.13	406,312.91	542,354.25
5	Brebes	205,889.55	219,420.79	188,356.17	265,370.65
6	Cilacap	403,277.86	619,106.99	322,721.12	396,674.68
7	Demak	312,585.13	371,705.66	364,156.26	368,482.73
8	Grobogan	235,218.41	241,060.29	258,022.62	300,751.77
9	Jepara	309,732.09	319,949.28	343,416.00	344,529.33
10	Karanganyar	386,613.36	444,595.59	399,206.21	539,225.25
11	Kebumen	414,375.27	438,521.90	300,087.49	381,794.70
12	Kendal	358,886.23	388,902.03	340,746.20	451,429.67
13	Klaten	353,094.40	272,660.56	252,442.88	308,051.44
14	Kudus	351,357.00	392,005.47	422,972.48	539,645.65
15	Magelang	273,662.39	306,281.20	246,383.57	320,934.15
16	Pati	298,940.85	297,754.47	292,220.25	289,927.33
17	Pekalongan	398,555.31	415,324.08	307,360.03	362,977.59
18	Pemalang	252,614.46	264,587.25	205,880.58	249,878.99
19	Purbalingga	327,192.17	349,726.64	294,848.33	385,416.16
20	Purworejo	387,183.22	432,755.86	395,906.12	566,535.13

21	Rembang	517,483.59	504,193.32	506,203.97	623,837.38
22	Kab Semarang	395,970.69	419,698.83	420,217.16	543,238.72
23	Sragen	408,856.98	414,023.69	549,941.00	546,200.71
24	Sukoharjo	506,578.92	527,187.69	517,350.48	579,587.93
25	Tegal	283,642.24	304,570.42	275,474.43	367,400.37
26	Temanggung	363,719.69	395,221.56	389,139.71	457,108.47
27	Wonogiri	270,810.11	312,196.83	252,860.66	230,847.44
28	Wonosobo	303,622.77	294,488.21	275,183.00	404,348.76
29	Banjarnegara	272,817.60	281,050.77	235,691.54	295,120.21
30	Kota Magelang	2,069,333.20	2,366,750.71	2,392,548.23	2,626,357.03
31	Pekalongan	576,506.96	735,523.95	902,654.79	947,194.30
32	Salatiga	1,153,653.45	1,158,392.39	1,141,519.95	1,450,380.77
33	Kota Semarang	1,083,520.33	1,229,317.70	1,332,177.84	1,440,297.36
34	Surakarta	1,055,891.67	1,114,361.41	943,357.90	1,072,412.42
35	Tegal	1,198,186.05	1,109,900.78	868,004.75	1,117,251.88

**Lampiran 8: Tabulasi Variabel Ukuran Pemda**

No	Kabupaten/ Kota	2018	2019	2020	2021
1	Banyumas	29.4904182	29.4598600	29.5090372	29.6131644
2	Batang	28.5519990	28.6109901	28.5436720	28.5613071
3	Blora	28.7015268	28.8437246	28.8497550	28.8940769
4	Boyolali	28.7676004	28.9581343	29.0726771	29.1697354
5	Brebes	28.8450086	29.0631161	28.9503103	28.9760972
6	Cilacap	29.1550045	29.3776186	29.4306276	29.4787006
7	Demak	29.2572468	29.3267235	29.3709820	29.4084522
8	Grobogan	28.8851516	28.9237782	28.9583673	29.0500762
9	Jepara	29.5023124	29.4445838	29.5221549	29.5293047
10	Karanganyar	28.7913339	28.8771746	29.1176818	29.2166752
11	Kebumen	29.1458600	29.1311627	29.1408018	29.1739659
12	Kendal	28.7563625	28.7385630	28.7723032	28.9194245
13	Klaten	29.0176465	29.0559108	28.9026836	28.8881206
14	Kudus	29.0563471	29.1280809	29.1722865	29.2100363
15	Magelang	28.7758045	28.8160036	28.8634583	28.9112298
16	Pati	29.4541053	29.4935116	29.4643859	29.4804907
17	Pekalongan	28.6475126	28.7365034	28.7514161	28.7754661
18	Pemalang	28.8873528	28.9625760	28.9668118	28.9893474
19	Purbalingga	28.5949264	28.6770511	28.6498663	28.6809477
20	Purworejo	28.6509366	28.7253682	28.7651479	28.8259610



21	Rembang	28.3650104	28.3932433	28.4839298	28.5489410
22	Kab Semarang	29.1083562	29.1764084	29.2179805	29.2981627
23	Sragen	28.8473267	29.0026709	29.0389736	29.0717075
24	Sukoharjo	29.1866710	29.2786514	29.3670864	29.4713055
25	Tegal	28.7892192	28.8481769	28.9132155	28.9766039
26	Temanggung	28.7639538	28.8066243	28.7893786	28.8607891
27	Wonogiri	28.8670439	28.9502073	28.9715514	28.9950567
28	Wonosobo	28.7527174	28.8520078	28.8668827	28.9559390
29	Banjarnegara	29.1025182	29.1282688	29.1415046	29.1595059
30	Kota Magelang	28.9830866	29.0205145	29.0565993	29.0982947
31	Pekalongan	28.5324213	28.6806792	28.7032612	28.7459055
32	Salatiga	28.7665148	28.7534006	28.7697183	28.7942943
33	Kota Semarang	31.0640679	30.5302102	30.6757298	30.7006383
34	Surakarta	29.6765916	30.0922416	30.1271917	30.1737916
35	Tegal	28.5077309	28.5138017	28.5052212	28.5286855

**Lampiran 9: Tabulasi Selluruh Variabel Penelitian**

No	Kabupaten/ Kota	Tahun	Y	X1	X2	X3	X4	X5	X6
1	Banyumas	2018	1	5	14	0.83673	1	402,293	29.4904
		2019	0	5	9	0.45833	1	418,376	29.4599
		2020	1	5	12	1	1	383,507	29.5090
		2021	1	5	10	0.21053	1	460,015	29.6132
2	Batang	2018	0	5	17	0.85294	0	330,350	28.5520
		2019	0	5	5	0.9	0	350,720	28.6110
		2020	0	5	13	0.85714	0	337,775	28.5437
		2021	0	5	7	0.5	0	388,096	28.5613
3	Blora	2018	1	3	16	1	0	287,172	28.7015
		2019	1	5	14	1	0	378,857	28.8437
		2020	1	5	10	0.83333	0	311,186	28.8498
		2021	1	5	5	0.76190	0	400,793	28.8941
4	Boyolali	2018	0	5	11	1	0	393,440	28.7676
		2019	0	5	6	1	0	388,358	28.9581
		2020	0	5	8	0.97143	0	406,313	29.0727
		2021	0	5	5	0.42857	0	542,354	29.1697
5	Brebes	2018	0	3	16	0.93333	1	205,890	28.8450
		2019	0	5	7	0.90000	1	219,421	29.0631
		2020	1	5	9	0.70588	1	188,356	28.9503

		2021	1	5	11	0.58621	1	265,371	28.9761
6	Cilacap	2018	0	5	13	0.78689	0	403,278	29.1550
		2019	0	5	8	0.86957	0	619,107	29.3776
		2020	0	5	14	0.58621	0	322,721	29.4306
		2021	1	5	8	0.50000	0	396,675	29.4787
7	Demak	2018	1	5	9	0.82609	0	312,585	29.2572
		2019	1	5	6	0.87097	0	371,706	29.3267
		2020	1	3	4	0.90000	0	364,156	29.3710
		2021	0	5	3	1	0	368,483	29.4085
8	Grobogan	2018	0	5	9	0.81667	0	235,218	28.8852
		2019	0	5	11	0.94444	0	241,060	28.9238
		2020	0	5	6	1	0	258,023	28.9584
		2021	0	5	9	0.25	0	300,752	29.0501
9	Jepara	2018	0	5	9	0.61333	0	309,732	29.5023
		2019	0	5	13	0.12903	0	319,949	29.4446
		2020	0	5	9	0.48148	0	343,416	29.5222
		2021	0	5	4	0.47619	0	344,529	29.5293
10	Karanganyar	2018	1	5	7	0.93750	0	386,613	28.7913
		2019	0	5	8	0.93548	0	444,596	28.8772
		2020	1	5	9	0.56667	0	399,206	29.1177
		2021	0	5	6	0.69565	0	539,225	29.2167
11	Kebumen	2018	0	5	13	0.67000	1	414,375	29.1459

		2019	1	5	7	0.84211	1	438,522	29.1312
		2020	1	5	12	0.88235	1	300,087	29.1408
		2021	1	5	9	0.40000	0	381,795	29.1740
12	Kendal	2018	1	3	7	0.72093	0	358,886	28.7564
		2019	1	5	7	0.63636	0	388,902	28.7386
		2020	0	5	11	0.75758	0	340,746	28.7723
		2021	0	5	6	0.66667	0	451,430	28.9194
13	Klaten	2018	1	5	17	0.66667	1	353,094	29.0176
		2019	1	5	6	0.66038	1	272,661	29.0559
		2020	1	5	11	0.93182	1	252,443	28.9027
		2021	1	3	4	0.77778	1	308,051	28.8881
14	Kudus	2018	1	5	11	0.75556	1	351,357	29.0563
		2019	1	5	8	0.41176	1	392,005	29.1281
		2020	1	5	13	0.75000	1	422,972	29.1723
		2021	1	3	6	0.51852	0	539,646	29.2100
15	Magelang	2018	1	5	12	0.72826	0	273,662	28.7758
		2019	1	5	5	0.52083	1	306,281	28.8160
		2020	0	5	11	0.54545	0	246,384	28.8635
		2021	0	5	8	0.28261	0	320,934	28.9112
16	Pati	2018	0	5	12	0.98810	1	298,941	29.4541
		2019	1	5	5	1	1	297,754	29.4935
		2020	0	5	17	1	1	292,220	29.4644

		2021	1	5	5	0.93478	1	289,927	29.4805
17	Pekalongan	2018	0	5	12	0.98413	1	398,555	28.6475
		2019	0	5	11	0.52381	1	415,324	28.7365
		2020	0	5	5	0.64286	1	307,360	28.7514
		2021	0	5	6	0.77778	1	362,978	28.7755
18	Pemalang	2018	1	5	13	0.83333	1	252,614	28.8874
		2019	0	5	4	0.71111	1	264,587	28.9626
		2020	0	5	9	1	0	205,881	28.9668
		2021	0	5	6	0.11538	0	249,879	28.9893
19	Purbalingga	2018	1	3	14	0.81522	0	327,192	28.5949
		2019	1	5	7	0.75758	0	349,727	28.6771
		2020	0	5	12	0.57143	0	294,848	28.6499
		2021	0	5	7	0.15385	0	385,416	28.6809
20	Purworejo	2018	0	5	9	0.78846	1	387,183	28.6509
		2019	1	5	7	0.70000	1	432,756	28.7254
		2020	1	5	5	0.41667	1	395,906	28.7651
		2021	1	5	10	0.80000	1	566,535	28.8260
21	Rembang	2018	0	5	13	0.76623	1	517,484	28.3650
		2019	1	5	10	0.64706	1	504,193	28.3932
		2020	1	5	7	0.69231	1	506,204	28.4839
		2021	1	5	5	0.47059	0	623,837	28.5489
22	Kab Semarang	2018	1	5	4	0.86364	1	395,971	29.1084

		2019	1	5	9	1	1	419,699	29.1764
		2020	1	5	8	0.61111	1	420,217	29.2180
		2021	1	5	6	0.33333	1	543,239	29.2982
23	Sragen	2018	1	5	13	0.96721	1	408,857	28.8473
		2019	0	5	11	0.97500	1	414,024	29.0027
		2020	1	5	10	0.95238	1	549,941	29.0390
		2021	0	5	7	0.11268	1	546,201	29.0717
24	Sukoharjo	2018	0	5	8	0.86364	1	506,579	29.1867
		2019	1	5	7	0.94444	1	527,188	29.2787
		2020	1	5	12	0.41860	1	517,350	29.3671
		2021	1	5	11	0.40678	1	579,588	29.4713
25	Tegal	2018	1	3	12	0.80263	0	283,642	28.7892
		2019	1	5	10	1	0	304,570	28.8482
		2020	1	5	6	0.85106	0	275,474	28.9132
		2021	1	5	10	0.29545	0	367,400	28.9766
26	Temanggung	2018	0	5	10	0.96721	0	363,720	28.7640
		2019	0	5	10	0.95556	0	395,222	28.8066
		2020	0	5	11	0.95833	0	389,140	28.7894
		2021	0	5	11	0.61290	0	457,108	28.8608
27	Wonogiri	2018	0	5	16	1	0	270,810	28.8670
		2019	1	5	3	1	0	312,197	28.9502
		2020	1	5	5	1	0	252,861	28.9716

		2021	0	5	5	1	0	230,847	28.9951
28	Wonosobo	2018	1	5	13	0.83333	1	303,623	28.7527
		2019	1	5	12	0.75000	1	294,488	28.8520
		2020	1	3	10	0.62162	1	275,183	28.8669
		2021	1	5	13	0.70588	1	404,349	28.9559
29	Banjarnegara	2018	0	5	14	0.88889	0	272,818	29.1025
		2019	1	5	6	0.88571	0	281,051	29.1283
		2020	1	5	4	0.83333	0	235,692	29.1415
		2021	1	5	9	0.75000	0	295,120	29.1595
30	Kota Magelang	2018	1	5	8	0.83333	1	2,069,333	28.9831
		2019	1	5	3	0.66667	1	2,366,751	29.0205
		2020	0	3	12	0.65625	1	2,392,548	29.0566
		2021	0	5	10	0.29630	1	2,626,357	29.0983
31	Pekalongan	2018	1	5	9	0.76712	0	576,507	28.5324
		2019	1	5	8	0.82353	0	735,524	28.6807
		2020	1	5	4	0.23913	0	902,655	28.7033
		2021	0	5	12	0.66667	0	947,194	28.7459
32	Salatiga	2018	0	5	14	0.95181	1	1,153,653	28.7665
		2019	0	5	5	0.88889	1	1,158,392	28.7534
		2020	0	5	13	0.93333	1	1,141,520	28.7697
		2021	0	5	9	0.72414	1	1,450,381	28.7943
33	Kota Semarang	2018	1	5	14	0.74775	1	1,083,520	31.0641

		2019	1	5	12	0.82857	1	1,229,318	30.5302
		2020	1	5	16	0.40299	1	1,332,178	30.6757
		2021	1	5	17	0.19780	1	1,440,297	30.7006
34	Surakarta	2018	1	5	12	0.90526	0	1,055,892	29.6766
		2019	1	5	7	1	0	1,114,361	30.0922
		2020	1	5	6	0.42424	0	943,358	30.1272
		2021	1	5	7	1	0	1,072,412	30.1738
35	Tegal	2018	1	5	8	0.48684	0	1,198,186	28.5077
		2019	0	5	5	0.69737	0	1,109,901	28.5138
		2020	1	5	7	0.08511	0	868,005	28.5052
		2021	0	5	7	0.68421	0	1,117,252	28.5287





## Lampiran 11: Hasil Uji Regresi Logistik

### Uji Model Fit (*Overall Model Fit Test*)

McFadden R-squared	0.090001	Mean dependent var	0.557143
S.D. dependent var	0.498508	S.E. of regression	0.479800
Akaike info criterion	1.349614	Sum squared resid	30.61765
			-
Schwarz criterion	1.496696	Log likelihood	87.47299
Hannan-Quinn criter.	1.409384	Deviance	174.9460
			-
Restr. Deviance	192.2486	Restr. log likelihood	96.12432
			-
LR statistic	17.30266	Avg. log likelihood	0.624807
Prob(LR statistic)	0.008233		
Obs with Dep=0	62	Total obs	140
Obs with Dep=1	78		

### Uji Hosmer and Lemeshow's Goodnes

H-L Statistic	14.1483	Prob. Chi-Sq(8)	0.0780
Andrews Statistic	17.4544	Prob. Chi-Sq(10)	0.0649

### Uji McFadden R-squared

McFadden R-squared	0.090001	Mean dependent var	0.557143
S.D. dependent var	0.498508	S.E. of regression	0.479800
Akaike info criterion	1.349614	Sum squared resid	30.61765
			-
Schwarz criterion	1.496696	Log likelihood	87.47299
Hannan-Quinn criter.	1.409384	Deviance	174.9460
			-
Restr. Deviance	192.2486	Restr. log likelihood	96.12432
			-
LR statistic	17.30266	Avg. log likelihood	0.624807
Prob(LR statistic)	0.008233		
Obs with Dep=0	62	Total obs	140
Obs with Dep=1	78		

## Uji Regresi Logistik

Dependent Variable: Y

Method: ML - Binary Logit (Newton-Raphson / Marquardt steps)

Date: 03/31/23 Time: 12:36

Sample: 2018 2021

Included observations: 140

Convergence achieved after 3 iterations

Coefficient covariance computed using observed Hessian

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	-28.49896	13.69693	-2.080683	0.0375
AUDIT (X1)	-0.855862	0.433515	-1.974238	0.0484
FIND (X2)	-0.102546	0.057125	-1.795124	0.0726
TLRA (X3)	-0.081406	0.774190	-0.105150	0.9163
KKD (X4)	0.881975	0.385680	2.286807	0.0222
PAD (X5)	-3.91E-07	4.56E-07	-0.857716	0.3910
SIZE (X6)	1.161187	0.475764	2.440679	0.0147
McFadden R-squared	0.090001	Mean dependent var	0.557143	
S.D. dependent var	0.498508	S.E. of regression	0.479800	
Akaike info criterion	1.349614	Sum squared resid	30.61765	
			-	
Schwarz criterion	1.496696	Log likelihood	87.47299	
Hannan-Quinn criter.	1.409384	Deviance	174.9460	
			-	
Restr. Deviance	192.2486	Restr. log likelihood	96.12432	
			-	
LR statistic	17.30266	Avg. log likelihood	0.624807	
Prob(LR statistic)	0.008233			
Obs with Dep=0	62	Total obs	140	
Obs with Dep=1	78			

## Uji Parsial

Dependent Variable: Y

Method: ML - Binary Logit (Newton-Raphson / Marquardt steps)

Date: 03/31/23 Time: 12:36

Sample: 2018 2021

Included observations: 140

Convergence achieved after 3 iterations

Coefficient covariance computed using observed Hessian

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	-28.49896	13.69693	-2.080683	0.0375
AUDIT (X1)	-0.855862	0.433515	-1.974238	0.0484
FIND (X2)	-0.102546	0.057125	-1.795124	0.0726
TLRA (X3)	-0.081406	0.774190	-0.105150	0.9163
KKD (X4)	0.881975	0.385680	2.286807	0.0222
PAD (X5)	-3.91E-07	4.56E-07	-0.857716	0.3910
SIZE (X6)	1.161187	0.475764	2.440679	0.0147

**Lampiran 12: Jadwal Penelitian**

No	Bulan	November				Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei							
		1	2	3	4	1	2	3	4					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
	Kegiatan																																
1.	Penyusunan Proposal					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																	
2.	Konsultasi					X	X	X	X	X	X			X			X			X	X	X	X	X									
3.	Revisi Proposal																			X	X	X	X	X	X	X							
4.	Pengumpulan Data																	X	X	X	X	X	X										
5.	Analisis Data																					X	X										
6.	Penulisan Akhir Skripsi																					X	X	X									
7.	Pendaftaran Munaqasah																							X									
8.	Munaqasyah																											X					
9.	Revisi Skripsi																													X	X	X	

**Lampiran 13: Daftar Riwayat Hidup****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Attarik Yusuf Aryantama
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Karanganyar, 20 Juni 2000
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Status : Belum Menikah
7. Alamat : Perum Jungke rt 2/13 Karanganyar
8. No. Telepon : 081390530575
9. Email : attarik200@gmail.com
10. Nama Ayah : Sariman
11. Nama Ibu : Etik Mardiyanti
12. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD N 3 Cangakan
  - b. SMP N 4 Karanganyar
  - c. SMA N 2 Karanganyar
13. Riwayat Organisasi (Internal dan Eksternal Kampus):
  - a. HMJ Akuntansi Syariah 2019 (Staff Bussines Plan)

## Lampiran 14: Cek Plagiasi

SKRIPSI ATTARIK YUSUF			
ORIGINALITY REPORT			
<b>27%</b>	<b>30%</b>	<b>10%</b>	<b>15%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
<b>1</b>	<a href="http://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a> Internet Source		<b>15%</b>
<b>2</b>	<a href="http://jurnal.unsyiah.ac.id">jurnal.unsyiah.ac.id</a> Internet Source		<b>2%</b>
<b>3</b>	<a href="http://repository.uinjambi.ac.id">repository.uinjambi.ac.id</a> Internet Source		<b>2%</b>
<b>4</b>	<a href="http://www.neliti.com">www.neliti.com</a> Internet Source		<b>1%</b>
<b>5</b>	<a href="http://journal.umy.ac.id">journal.umy.ac.id</a> Internet Source		<b>1%</b>
<b>6</b>	<a href="http://journal.trunojoyo.ac.id">journal.trunojoyo.ac.id</a> Internet Source		<b>1%</b>
<b>7</b>	<a href="http://journal.ubm.ac.id">journal.ubm.ac.id</a> Internet Source		<b>1%</b>